



**DOKUMEN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022  
KOTA TEBING TINGGI**

**P-RKPD TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Tahun 2022 merupakan Tahun Kelima penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan II (Triwulan dua) pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, maka didapat gambaran target-target yang telah terlaksana, target-target yang belum optimal, maupun target-target yang belum terlaksana. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai dasar menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi. Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi berupaya mewujudkan capaian kinerja yang belum tercapai dan mempertahankan capaian kinerja yang telah baik sebagaimana ditetapkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi ini sebagai pedoman dan acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan dan sebagai langkah awal dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA), Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) serta Pedoman Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi,

Juli 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

---

---

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2022 .....	I-3
1.5 Hubungan Antar Dokumen .....	I-4
1.6 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-4
<b>BAB II EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun berkenaan serta Realisasi RPJMD.....	II-1
2.2 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 .....	II-1
2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.....	II-28
2.4 Isu Strategis Permasalahan Pokok Pembangunan di Kota Tebing Tinggi.....	II-32
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi.....	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota Tebing Tinggi .....	III-8
<b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 .....	IV-53
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>VI-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	II-1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tebing Tinggi .....	II-9
Tabel 2.3	Rekapitulasi Rata-rata Capaian Kinerja Program dan Predikat Kinerja Program Triwulan II Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi .....	II-28
Tabel 2.4	Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi .....	II-30
Tabel 2.5	Permasalahan dan Strategi Penyelesaian Pembangunan Daerah .....	II-32
Tabel 3.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017 – 2021 .....	III-1
Tabel 3.2	PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 .....	III-3
Tabel 3.3	PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.....	III-6
Tabel 3.4	Proyeksi Perubahan Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 .....	III-10
Tabel 3.5	Proyeksi Perubahan Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 .....	III-12
Tabel 3.6	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 .....	III-14
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tebing Tinggi .....	IV-1
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 .....	IV-10
Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Provsu. ....	IV-55
Tabel 5.1	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	V-1
Tabel 5.2	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	V-2
Tabel 5.3	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Urusan Pemerintahan Pilihan.....	V-2
Tabel 5.4	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	V-3
Tabel 5.5	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....	V-4
Tabel 5.6	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .....	V-4
Tabel 5.7	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Unsur Kewilayahan .....	V-4
Tabel 5.8	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi Unsur Pemerintahan Umum .....	V-4
Tabel 5.9	Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi .....	V-4
Tabel 5.10	Capaian Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis pada Perubahan RKPD .....	V-4
Tabel 5.11	Penyelarasan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Program/Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi.....	V-7



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi adalah dokumen perubahan perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 Kota Tebing Tinggi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi yang disusun melalui proses evaluasi, inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi merupakan pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi masih tetap berfokus dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengarah kepada kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah.

Bagi Perangkat Daerah Perubahan RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) dan penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan target capaian kinerja, lokasi dan pagu pendanaan. Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD akan tetapi RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi tidak mengalami perubahan sehingga tidak terdapat penambahan/pengurangan program dalam Perubahan RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Penyesuaian-penyesuaian dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2022.



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai mana telah diiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;



- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
- 15) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
- 16) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
- 17) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2017 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022;
- 18) Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022;
- 19) Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tebing Tinggi Tahun 2022;
- 20) Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kota Tebing Tinggi.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kota Tebing Tinggi sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 yang akan dibahas dengan DPRD, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan PPAS antara DPRD Kota Tebing Tinggi dengan Walikota Tebing Tinggi yang selanjutnya akan dijabarkan dalam P.APBD Tahun 2022.
- b. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
- c. Memberikan dasar hukum penggunaan SILPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2022;
- d. Memberikan dasar hukum perubahan target capaian kinerja, lokasi dan pagu pendanaan.



- e. Sebagai acuan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dalam menyusun Perubahan Renja Tahun 2022.

#### **1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Tahun 2022**

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan didasarkan pada Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Perubahan RKPD Tahun 2022 perlu segera dilaksanakan mengingat dalam pelaksanaan APBD TA. 2022 terdapat beberapa kegiatan yang perlu penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan Triwulan II.

#### **1.5 Hubungan Antar Dokumen**

Bahwa hubungan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi telah berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi, RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi, RKPD Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara dan RKP Tahun 2022.

#### **1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 disusun sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN**

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**BAB VI PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun berkenaan serta Realisasi RPJMD

Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah seperti yang telah diamanatkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi 3 (tiga) aspek yaitu :

- Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan, kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Daerah

Dari Ketiga Aspek tersebut diatas maka terkait capaian pertumbuhan ekonomi dan sosial seperti data makro, pembangunan ekonomi meliputi LPE, PDRB ADHK/ADHB, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini adalah hal-hal yang termasuk dalam evaluasi pelaksanaan program pembangunan di Kota Tebing Tinggi

#### 2.2 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun ke lima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi dengan masa perodesasi Tahun 2017-2022. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memiliki 173 Indikator Sasaran Pembangunan yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 yang menjadi perhatian fokus dalam meningkatkan Kinerja Pembangunan Kota Tebing Tinggi secara detail tersaji pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (Tw II)
1	Pendidikan dan tenaga yang menerima beasiswa untuk peningkatan Pendidikan formal dan non formal	Orang	4	100	3	50
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan yang Berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Orang	300	100	319	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (Tw II)
3	Tambahan penghasilan Pendidik dan tenaga Pendidikan	Persen	20	100	20	50
4	Prestasi Pendidik dan siswa yang diperoleh pada tingkat internasional, nasional dan regional	Orang	4	100	4	50
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	-2	100	-2	50
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Paket A	Persen	-2	100	-2	50
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Paket A	Persen	0.50	100	0.50	50
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan Paket B	Persen	-2	100	-2	50
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan Paket B	Persen	1.00	100	1.00	50
10	Penerima Beasiswa bagi Siswa yang di kategorikan Mampu/Miskin	Orang	14456	100	14456	50
11	Alat Praktik dan Media Pembelajaran	Jenis	7	100	7	50
12	Meubiler ruang kelas dan ruang penunjang lainnya	Persen	7	100	7	50
13	Gedung dan Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	Persen	6	100	6	50
14	Ketersediaan Ruang Penunjang (Perpustakaan, Laboratorium, Ruang Guru, Ruang UKS, Jamban, RTH, dll) di setiap satuan Pendidikan	Persen	8	100	8	50
15	Data Pokok Pendidik	Persen	4	100	4	50
16	Data Pokok Pendidikan	Persen	4	100	100	50
17	Kemampuan TIK bagi Pendidik dan Kependidikan	Persen	8	100	55	50
18	Sekolah yang Memiliki Website	Skhlh	10	100	10	50
19	Penerapan E-Pembelajaran	Persen	8	100	6	50
20	Kurikulum Muatan Lokal	Jenis	2	100	2	50
21	Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter.	Skhlh	20	100	20	50
22	Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas	Persen	0,0003	100	0,0003	50
23	Pelatihan Kecakapan Hidup bagi Masyarakat	Kgt	1	100	1	50
24	Lulusan SMA/MA, dan SMK yang mendapat beasiswa yang di terima di PTN	Tahun	1	100	1	50
25	Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi	Orang	100	100	100	50
26	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung pada Laboratorium Terpadu Kota Tebing Tinggi	Persen	6	100	6	50
27	Ketersediaan Perlengkapan dan	Mapel	1	100	1	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (Tw II)
	Alat Praktek pada Laboratorium Terpadu Kota Tebing Tinggi					
28	Pendirian Politeknik Negeri	Kampus	-	100	1	50
29	Cagar Budaya, Benda Bersejarah, dan Kesenian Daerah yang dilindungi	Jenis	-	-	-	-
30	Sanggar Seni dan Budaya	Unit	1	100	1	50
31	Pakaian Tari	Set	1	100	1	50
32	Alat Seni Musik	Set	1	100	1	50
33	Pagelaran Seni dan Budaya	Pegelaran	1	100	1	50
34	Festival Seni dan Budaya	Festival	1	100	1	50
35	Jumlah Kematian Ibu	Orang	2	100	2	50
36	Angka kematian Bayi	kh	4.9/1000	100	4.8/1000	50
37	Persentase Puskesmas terakreditasi.	Persen	100	100	100	50
38	Persentase pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persen	100	100	100	50
39	Persentase kepersertaan BPJS	Persen	90	100	90	50
40	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	50
41	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persen	100	100	100	50
42	Persentase penyakit yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	Persen	100	100	100	50
43	Prevalensi balita gizi buruk	Persen	0,05	100	0,05	50
44	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	Persen	100	100	100	50
45	Peningkatan status rumah sakit pemerintah	Pendidikan	B Pendidikan	100	B Pendidikan	50
46	Peningkatan status akreditasi rumah sakit	Dasar	Paripurna	100	Paripurna	50
47	Persentase kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan operasional secara mandiri dengan pola PPK-BLUD Rumah sakit Pemerintah	Persen	76	100	80	50
48	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	2	100	1	50
49	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persen	7.10	100	7.10	50
50	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	15	100	10	50
51	Luas irigasi dalam kondisi baik	Persen	4	100	4	50
52	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	-	-
53	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	100	Ada	50
54	Penjabaran Konsistensi Program	Persen	100	100	100	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (Tw II)
	RPJMD kedalam RKPD					
55	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	50
56	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	85	100	90	50
57	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi baik/layak	Persen	70	100	75	50
58	Persentasi Tersedianya luasan RTH publik.	Persen	24	100	25	50
59	Rasio tempat pemakaman umum/satuan penduduk	Jiwa/Unit	1835	100	2018	50
60	Pengembangan kota hijau di 5 kecamatan.	Lokasi	1	100	2	50
61	Cakupan layanan Rumah layak huni yang terjangkau	Persen	49	100	50	50
62	Rasio permukiman layak huni	ha	0,76 ha	100	0,84 ha	50
63	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Unit	47467	100	49622	50
64	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum	Persen	73	100	74	50
65	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Unit	5	100	35	50
66	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	19,5	100	20	50
67	Tersedianya sistem pengangkutan sampah perkotaan	Persen	66	100	69	50
68	Tersedianya Sistem Pengoperasian TPA Sampah	Persen	68	100	69	50
69	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	96	100	97	50
70	Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran	Persen	92	100	94	50
71	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	n/a	16	100	16	50
72	Persentase pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan yang menerima pelayanan kesejahteraan social	n/a	100	100	100	50
73	Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	90	100	100	50
74	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	4	100	2	50
75	Tersedianya Database dan Pemasaran produk Usaha Mikro berbasis aplikasi	Ada	Ada	100	ada	50
76	Terbentuknya Dewan Perekonomian Daerah	Ada	Ada	100	ada	50
77	Tersedianya data harga bahan pokok dan bahan sinergis lainnya	Ada	Ada	100	ada	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (Tw II)
	pada aplikasi Siharapanku					
78	Tersedianya Sistem Informasi Perdagangan dan Pusat Pengaduan (Trade Centre dan Command Centre)	Ada	Ada	100	ada	50
79	Persentasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah bertanda terasah yang berlaku	Persen	15	100	20	50
80	Tersedianya dana bergulir bagi pelaku usaha mikro dan koperasi	Ada	Ada	100	ada	50
81	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	22,96	100	23,14	50
82	Persentasi Koperasi Aktif	Persen	42	100	45	50
83	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	50
84	Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi	Titik	7	100	7	50
85	Persentase organisasi pemuda yang aktif	n/a	90	100	100	50
86	Persentase wirausaha pemuda	n/a	40	100	50	50
87	Jumlah atlet berprestasi	Orang	11	100	12	50
88	Jumlah prestasi olahraga	Cabor beregu	5	100	5	50
89	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	n/a	75	100	80	50
90	Cakupan pembinaan olahraga	n/a	75	100	80	50
91	PAD sektor Pariwisata terhadap total PAD	n/a	9	100	10	50
92	Kunjungan wisata	n/a	8000	100	10000	50
93	Lapangan Olahraga	unit	1	100	1	50
94	Unjuk Rasa	kasus	17	100	16	50
95	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	100	wajar tanpa pengecualian	50
96	Peningkatan Target pendapatan pajak daerah	Miliar	32	100	35	50
97	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	3	100	3,25	50
98	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi	Persen	80	100	80	50
99	1. Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura yang meningkat			100		50
	- Padi (GKP) (kw/ha)	(kw/ha)	68	100	69	50
	- Jagung (kw/ha)	(kw/ha)	55	100	55	50
	- Kacang Tanah (kw/ha)	(kw/ha)	16	100	16	50
	- Kacang Hijau (kw/ha)	(kw/ha)	12	100	12	50
	- Ubi Kayu (kw/ha)	(kw/ha)	600	100	600	50
	- Ubi Jalar (kw/ha)	(kw/ha)	120	100	120	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (Tw II)
	- Bawang merah (kw/ha)	(kw/ha)	60	100	60	50
	- Cabe merah (kw/ha)	(kw/ha)	74	100	75	50
	- Sawi (kw/ha)	(kw/ha)	36	100	36	50
	- Kangkung (kw/ha)	(kw/ha)	38	100	38	50
	- Bayam (kw/ha)	(kw/ha)	46	100	46	50
	2. Nilai Tukar Petani	(kw/ha)	1,3	100	1,3	50
	1. Peningkatan populasi ternak di Kota Tebing Tinggi					
	- Sapi Perah	Ekor	87	100	87	50
	- Kambing	Ekor	8563	100	9419	50
	- Domba	Ekor	6300	100	6300	50
	2. Peningkatan produksi ikan dan benih ikan					
	- Ikan Mas	Ton	190	100	190	50
	- Ikan Nila	Ton	128	100	128	50
	- Ikan Lele	Ton	1900	100	1900	50
	- Ikan Gurami	Ton	56	100	56	50
	- Ikan Patin	Ton	38	100	38	50
	3. Peningkatan SDM Pengolah dan Pembudidaya Ikan dan Perbenihan					
	- Kelompok Pembudidaya ikan	Kelompok	74	100	88	50
	- Kelompok Unit perbenihan rakyat (UPR )	Kelompok	10	100	11	50
	- Kelompok pengolahan ikan	Kelompok	6	100	7	50
	- Kelompok Pembudidaya Ikan Hias	Kelompok	5	100	6	50
	4. Tingkat Konsumsi ikan per kapita		44	100	44	50
100	Event pelatihan dalam penanggulangan bencana bagi masyarakat dan petugas	Orang	270	100	300	50
101	Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	90	100	100	50
102	Persentase LPM Berprestasi	Persen	20	100	25	50
103	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	50
104	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	50
105	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	91	100	94	50
106	Level Maturitas SPIP	Skor	4	100	5	50
107	Persentase formasi PNS dengan analisis jabatan yang tepat dengan memangku jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi dan profesionalitas pegawai	Persen	100	100	100	50
108	Peningkatan kepatuhan hukum dan disiplin PNS	Persen	95	100	95	50
109	Nilai Adipura	Nilai	75,8	100	76	50



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (Tw II)
110	Parameter tanah yang memenuhi baku mutu	Kecamatan	4	100	5	50
111	Parameter air yang memenuhi baku mutu	Sektor	4	100	4	50
112	Parameter udara yang memenuhi baku mutu	Sektor	4	100	4	50
113	Hutan kota yang direhabilitasi	Lokasi	0	100	5	50
114	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Nilai	0,074	100	0,072	50
115	Cakupan pemakaian kontrasepsi	Persen	80	100	80	50
116	Persentase KB Aktif/CPR	Persen	80	100	90	50
117	Angka kelahiran (TFR) per PUS (15-49 tahun)	Angka Lahir Hidup	2,12	100	2,1	50
118	Angka Kelahiran Pada remaja usia 15-19 tahun	Angka Lahir Hidup	22	100	22	50
119	Persentase Perempuan di lembaga legislative	Persen	26	100	30	50
120	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standart	Persen	65	100	80	50
121	Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standart	Persen	65	100	80	50
122	Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Persen	0,6	100	0,2	50
123	Persentase Penegakan Perda	Persen	70	100	75	50
124	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kota Tebing Tinggi	Persen	70	100	85	50
125	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan supervisi atas pengelolaan arisp dinamis	OPD	6	100	6	50
126	Jumlah pengunjung perpustakaan (pemustaka) ke perpustakaan	Orang	200.000	100	210.000	50
127	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	20.600	100	21.500	50
128	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kategori A	3,34 kategori A	100	3,35 kategori A	50
129	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Nilai	5M	100	5M	50
130	Hearing Dialog antara Pejabat Daerah / Tokoh Masyarakat dan Agama.	Kali	4	100	8	50
131	Jumlah Rumah Ibadah yang menyelenggarakan palatihan bidang agama	Rumah Ibadah	200	100	220	50
132	Cakupan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan.	Persen	95	100	95	50
133	Persentase implementasi hasil kesepakatan kerjasama.	Persen	90	100	90	50
134	Nilai dan pemeringkatan LPPD.	Nilai	3	100	3	50



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (Tw II)
135	Jumlah pilar batas daerah.	Pilar	25	100	0	50
136	Menghadiri dan mengikuti Rakernas APEKSI	Kegiatan	1	100	1	50
137	Evaluasi perkembangan kelurahan	Persen	80	100	95	50
138	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi e-kecamatan dan e-kelurahan.	Persen	80	100	95	50
139	Persentase penanganan masalah hukum	Persen	100	100	100	50
140	Persentase Produk hukum daerah dan kajian Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	100	50
141	Persentase Perda dan Perwa yang dihasilkan	Persen	85	100	85	50
142	Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	50
143	Persentase Produk Hukum yang dapat diakses melalui internet oleh pegawai pemerintah dan masyarakat	Persen	100	100	100	50
144	Tersediannya informasi kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	Persen	75	100	80	50
145	Tertingkatnya jumlah partisipasi media jumlah media massa yang mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	Persen	85	100	90	50
146	Terpublikasikannya Kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui media pemerintah, media luar ruang dan media elektronik	Persen	85	100	90	50
147	Terlaksananya kerjasama dengan media massa dalam rangka Public Awareness Campaign.	Persen	75	100	80	50
148	Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemda.	Persen	85	100	90	50
149	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan yang efisien, transparan, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi.	Persen	100	100	100	50
150	Jumlah dokumen SIRUP yang dipublikasi	Persen	100	100	100	50
151	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Pokok	Ada	Ada	100	ada	50
152	Terlaksananya Operasi Pasar	Ada	Ada	100	ada	50
153	Terlaksananya Operasional Pendistribusian RASTRA	Persen	100	100	100	50
154	Terlaksananya kegiatan kedinasan KDH dan WKDH	Persen	100	100	100	50



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (Tw II)
155	Persentase seluruh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	Persen	100	100	100	50
156	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP)	Persen	100	100	100	50
157	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Persen	CC	100	B	50
158	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan				
159	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	3,70	100	3,80	50
160	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	37,00	100	38,00	50
161	Inflasi		2,00	100	2,00	50
162	Nilai Investasi	(milyar rupiah)	237,554	100	282.945	50
163	Angka Melek Huruf	Persen	99,77	100	99,80	50
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,52	100	11,52	50
164	Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah	Nilai	63,74	100	68,85	50
165	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,10	100	71,23	50
166	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,05	100	6,00	50
167	Rata-Rata Pendapatan Masyarakat	Rupiah	2.654.180	100	2.854.190	50
168	Pasar yang berkualitas		8	100	8	50
169	Fasilitas Umum yang Berkualitas		7	100	7	50
170	Presentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	68	100	68	50
171	Indeks Kualitas Air		80	100	80	50
172	Indeks Kualitas Udara		85	100	85	50
173	Tutupan Lahan (ha)		373,1625	100	497,55	50

Dari hasil evaluasi indikator kinerja utama (IKU) Kota Tebing Tinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sudah mencapai 50%, hal ini berdasar analisa yang dilakukan terjadi karena kemampuan pemahaman pelaksana kegiatan di masing-masing SKPD masih belum optimal, regulasi yang terbit berkaitan capaian tersebut juga mengalami perubahan, factor kemampuan keuangan.

Adapun hasil evaluasi indikator kinerja daerah (IKD) Kota Tebing Tinggi sampai dengan Tahun Berkenaan (triwulan II) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tebing Tinggi**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
1	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
	1. Peringatan Hari - Hari Besar Keagamaan	100%	100	100%	50
	2. Pengembangan potensi masyarakat dalam bidang keagamaan dan seni	3	100	3	50
	3. Peringatan hari - hari besar Nasional dan Daerah	100%	100	100%	50
1	4. Jumlah Rumah Ibadah yang menyelenggarakan palatiahn bidang agama	180 rumah	100	170 rumah	50
	2	<b>BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN PERLENGKAPAN</b>			
		1. Terlaksananya kegiatan kedinasan KDH dan WKDH	100%	100	100%
	3	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>			
1. Cakupan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kecamatan.		95%	100	95%	50
2. Persentase Implementasi hasil kesepakatan kerjasama.		90%	100	90%	50
3. Nilai dan pemeringkatan LPPD.		3	100	3	50
4. Jumlah pilar batas daerah.		25 pilar	100	0 pilar	50
5. Menghadiri dan mengikuti Rakernas APEKSI		1 kegiatan	100	1 kegiatan	50
6. Evaluasi perkembangan Kelurahan		80%	100	95%	50
7. Tingkat Pelayanan Publik Berbasis Content Teknologi Informasi E-Kecamatan dan E-Kelurahan.		80%	100	95%	50
8. Jumlah sertifikat tanah yang didaftarkan	0	100	0	50	
4	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>				
	1. Persentase paket pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan yang efisien, transparan, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi.	100%	100	100%	50
	2. Jumlah dokumen SIRUP yang dipublikasi	100%	100	100%	50
	3. Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Pokok	ada	100	ada	50
	4. Termonitornya Penyaluran LPG Bersubsidi	ada	100	ada	50
	5. Kordinasi, Monitoring dan Evaluasi perkembangan perusahaan Daerah, Koperasi dan UMKM	ada	100	ada	50
	6. Sosialisasi Pengembangan Usaha	ada	100	ada	50
7. Terlaksananya Operasi Pasar	ada	100	ada	50	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	8. Terlaksananya Operasional Pendistribusian RASTRA	100%	100	100%	50
	9. Promosi Potensi Daerah	ada	100	ada	50
5	<b>BAGIAN HUKUM</b>				
	1. Persentase penanganan masalah hukum	100%	100	100%	50
	2. Persentase Produk hukum daerah dan kajian Perda yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100	100%	50
	3. Persentase Perda dan Perwa yang dihasilkan	85%	100	85%	50
	4. Persentase Produk Hukum Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang – Undangan	100%	100	100%	50
	5. Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	100%	100	100%	50
	6. Persentase Produk Hukum yang dapat diakses melalui internet oleh Pegawai Pemerintah dan Masyarakat	100%	100	100%	50
6	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>				
	1. Persentase seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	100%	100	100%	50
	2. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	100%	100	100%	50
	3. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey IKM	100%	100	100%	50
	4. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100	100%	50
	5. Tingkat Akuntabilitas Kinerja	c	100	b	50
7	<b>BAGIAN ADMINISTRASI HUMAS PIMPINAN PROTOKOL</b>				
	1. Meningkatnya kapasitas SDM mengenai Jurnalistik, Kehumasan dan Keprotokolan.	75%	100	80%	50
	2. Tersediannya informasi kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	75%	100	80%	50
	3. Peningkatnya jumlah partisipasi media jumlah media massa yang mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	85%	100	90%	50
	4. Terpublikasikannya Kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui media pemerintah, media luar ruang dan media elektronik	85%	100	90%	50
	5. Terlaksananya kerjasama dengan media massa dalam rangka Public Awareness Campaign.	75%	100	80%	50
	6. Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemda.	85%	100	90%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
8	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
	Hearing Dialog antara Pejabat Daerah / Tokoh Masyarakat dan Agama	4 kali	100	8 kali	50
9	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	100	-	50
	2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100%	100	ada	50
	3. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100	100%	50
	4. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	ada	100	100%	50
10	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATN DAN ASET DAERAH</b>				
	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan BIMTEK tentang Pajak Daerah	5 orang	100	5 orang	50
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Wajar tanpa pengecualian	100	Wajar tanpa pengecualian	50
	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	100%	100	100%	50
	Terlaksananya pembayaran non tunai	100%	100	100%	50
	Peningkatan Target Pendapatan Pajak Daerah	32 miliar	100	35 miliar	50
	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah	70%	100	75%	50
	Terlaksananya E - Budgeting	100%	100	100%	50
	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui E-Pajak	100%	100	100%	50
11	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				
	Jumlah Peningkatan kualifikasi pendidikan Pegawai ASN melalui Tugas Belajar dan Tugas Kedinasan	10 orang	100	10 orang	50
	Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti dan lulus sertifikasi Diklat Kepemimpinan	30 orang	100	30 orang	50
	Jumlah Peningkatan kualitas kompetensi dan kapasitas pegawai ASN melalui Diklat Teknis dan Fungsional	300 orang	100	300 orang	50
	Persentase pengisian jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi dan profesionalitas pegawai	80%	100	80%	50
	Persentase distribusi Pegawai ASN yang tepat sasaran	80%	100	80%	50
	Persentase tingkat kepatuhan hukum dan disiplin Pegawai ASN	100%	100	100%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaiaan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100	100%	50
12	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>				
	1. Penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana baru	4 jenis	100	4 jenis	50
	2. Perawatan rutin sarana dan prasarana penanggulangan bencana	100%	100	100%	50
	3. Pembangunan infrastruktur mitigasi banjir	3 paket	100	3 paket	50
	4. Persentase korban yang diberikan bantuan	85%	100	90%	50
	5. Tersedianya personil dan unit pelaksana operasional penanggulangan bencana dan posko kesiapsiagaan	90 orang	100	100 orang	50
	6. Event pelatihan dalam penanggulangan bencana bagi masyarakat dan petugas	270 orang	100	300 orang	50
	7. Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	2 desa/ kelurahan	100	2 desa/ kelurahan	50
13	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLINMAS</b>				
	1. Unjuk Rasa	17 kasus	100	16 kasus	50
	2. Jumlah masalah terkait ketahanan bangsa	0 masalah	100	0 masalah	50
	3. Jumlah insiden yang diakibatkan masalah perbedaan agama	0 masalah	100	0 masalah	50
	4. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 kegiatan	100	1 kegiatan	50
	5. Persentase LSM aktif	51%	100	52%	50
	6. Kegiatan pembinaan politik daerah	1 kegiatan	100	1 kegiatan	50
14	<b>INSPEKTORAT</b>				
	1. Persentase tindak lanjut temuan	87%	100	90%	50
	2. Level Maturitas SPIP	4	100	5	50
15	<b>RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE</b>				
	1. Peningkatan status rumah sakit pemerintah	B pendidikan	100	B pendidikan	50
	2. Peningkatan status akreditasi rumah sakit	Dasar	100	Dasar	50
	3. Persentase kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan operasional secara mandiri dengan pola PPK-BLUD Rumah sakit Pemerintah	76%	100	80%	50
16	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				
	1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima beasiswa untuk peningkatan pendidikan formal dan non formal	4	100	3	50
	2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan yang Berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	300	100	319	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	3. Tambah penghasilan Pendidik dan Tenaga kependidikan	20%	100	20%	50
	4. Prestasi Pendidik dan Siswa yang di peroleh pada tingkat Internasional, Nasional dan Regional	4%	100	4%	50
	5. Implementasi pelaksanaan pendidikan karakter.	20%	100	20%	50
	7. Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas	0,0003%	100	0,0003%	50
	8. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	-2%	100	-2%	50
	9. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Paket A	-2%	100	-2%	50
	10. Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Paket A	0,50	100	0,50	50
	11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan Paket B	-2%	100	-2%	50
	12. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan Paket B	1,00	100	1,00	50
	13. Lulusan SMA/MA, dan SMK yang mendapat beasiswa yang di terima di PTN	1 tahun	100	1 tahun	50
	14. Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi	100 orang	100	100 orang	50
	15. Penerima Beasiswa bagi Siswa yang di kategorikan Mampu/Miskin	14456 orang	100	14456 orang	50
	16. Alat Praktik dan Media Pembelajaran	7 jenis	100	7 jenis	50
	17. Meubiler ruang kelas dan ruang penunjang lainnya	7	100	7	50
	18. Gedung dan Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	6	100	6	50
	19. Ketersediaan Ruang Penunjang (Perpustakaan, Laboratorium, Ruang Guru, Ruang UKS, Jamban, RTH, dll) di setiap satuan pendidikan	8	100	8	50
	20. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung pada Laboratorium Terpadu Kota Tebing Tinggi	0,06	100	0,06	50
	21. Ketersediaan Perlengkapan dan alat Praktek pada Laboratorium Terpadu Kota Tebing Tinggi	1 mapel	100	1 mapel	50
	22. Cagar Budaya, Benda Bersejarah, dan Kesenian Daerah yang dilindungi	1 jenis	100	-	50
	23. Sanggar Seni dan Budaya	1 unit	100	1 unit	50
	24. Pakaian Tari	1 set	100	1 set	50
	25. Alat Seni Musik	1 set	100	1 set	50
	26. Pagelaran Seni dan Budaya	1 pegelaran	100	1 pegelaran	50
	27. Festival Seni dan Budaya	1 festival	100	1 festival	50
	28. Sekolah yang Memiliki Website	10 SKLH	100	10 SKLH	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	29. Penerapan e-pembelajaran	8	100	6	50
	30. Data Pokok Pendidikan	4	100	4	50
	31. Kemampuan TIK bagi Pendidik dan Kependidikan	8	100	8	50
	32. Pendirian Politeknik Negeri	-	-	1 kampus	50
	33. Kurikulum muatan local	2 jenis	100	2 jenis	50
	34. Pelatihan Kecakapan Hidup bagi Masyarakat	1 kgt	100	1 kgt	50
17	DINAS KESEHATAN				
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil.	100%	100	100%	50
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin.	100%	100	100%	50
	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	100%	100	100%	50
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100	100%	50
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	100	100%	50
	Jumlah Kematian Ibu	3 orang	100	2 orang	50
	Angka kematian Bayi	4.9/1000 kh	100	4.8/1000 kh	50
	Persentase pelayanan kesehatan balita.	100%	100	100%	50
	Cakupan kunjungan bayi	95%	100	100%	50
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	100%	100	100%	50
	Persentase sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 20 jam.	80%	100	100%	50
	Rasio jumlah tenaga kesehatan puskesmas sesuai dengan standar.	75%	100	90%	50
	Rasio jumlah tenaga kesehatan rumah sakit sesuai dengan standar.	100%	100	100%	50
	Persentase Kunjungan Rawat jalan	35%	100	25%	50
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	100%	100	100%	50
	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	9 puskesmas	100	9 puskesmas	50
	Persentase Puskesmas Terakreditasi	90	100	100%	50
	Persentase Rumah Sakit Pemerintah dan swasta terakreditasi	805	100	90%	50
	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar pelayanan Minimal.	100%	100	100%	50
	Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	95%	100	100%	50
	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	75%	100	85%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian pada puskesmas sesuai dengan standar permenkes	85%	100	90%	50
	Persentase sarana produksi dan distribusi makanan dan minuman	95%	100	100%	50
	Persentase sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional dan kosmetik	90%	100	100%	50
	Persentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar permenkes.	100%	100	100%	50
	26. Persentase pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	100%	100	100%	50
	27. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang melayani program BPJS	100%	100	100%	50
	28. Persentase kepersertaan BPJS	89%	100	90%	50
	29. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100	100%	50
	30. Persentase tenaga promosi kesehatan di puskesmas yang mendapat pelatihan	90%	100	100%	50
	31. Jumlah Kelurahan yang mendapat sosialisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	25 kelurahan	100	35 kelurahan	50
	32. Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan cuci tangan pakai sabun (CTPS)	100 sekolah	100	100 sekolah	50
	33. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan dasar	80%	100	80%	50
	34. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah puskesmas	8 puskesmas	100	9 puskesmas	50
	35. Persentase Jamaah Haji yang diperiksa kebugaran jasmani	100%	100	100%	50
	36. Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD	80%	100	100%	50
	37. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	100	100%	50
	38. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	100	100%	50
	39. Persentase pengendalian penyakit Demam Berdarah (DBD)	100%	100	100%	50
	40. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif.	90%	100	100%	50
	41. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	100%	100	100%	50
	42. Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.	90%	100	100%	50
	43. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	80%	100	100%	50
	44. Persentase Instansi dan institusi pendidikan yang melaksanakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok)	80%	100	100%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	45. Persentase kelurahan yang melaksanakan pembinaan kota sehat	90%	100	100%	50
	46. Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	95%	100	100%	50
	47. Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	95%	100	100%	50
	48. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	99%	100	100%	50
	49. Persentase usia dibawah 2 tahun yang mendapat imunisasi lanjutan.	100%	100	100%	50
	50. Persentase anak sekolah dasar yang mendapat imunisasi.	100%	100	100%	50
	51. Persentase penyakit yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%	100	100%	50
	52. Persentase calon Jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan.	100%	100	100%	50
	53. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100	100%	50
	54. Prevalensi balita gizi buruk(%)	0,06	100	0,05	50
	55. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100	100%	50
	56. Persentase balita yang ditimbang berat badannya	84%	100	85%	50
	57. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	42%	100	45%	50
	58. Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium	100%	100	100%	50
	59. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	94%	100	95%	50
	60. Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambahan darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan	95%	100	96%	50
	61. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	70%	100	75%	50
	62. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	95%	100	100%	50
	63. Persentase remaja putri tablet tambah darah	45%	100	50%	50
	64. Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin	97%	100	100%	50
	65. Persentase bayi baru lahir mendapat IMD	95%	100	95%	50
	66. Persentase balita mempunyai buku KIA/KMS	100%	100	100%	50
18	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>				
	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota	2 km	100	1,5 km	50
	Jembatan yang dibangun	0	100	0	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Terbangunnya flyover pada perlintasan sebidang Jalan Sudirman-Jalan H.M. Yamin	80%	100	100%	50
	Terbangunnya jalan lingkar (Jalan Baja-Jalan Syech Beringin-Jalan Abdul Hamid-Jalan Asrama-Persiapkan-Tualang-Lubuk Baru)	12 km	100	15 km	50
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	2%	100	1%	50
	Kondisi Alat-alat berat dalam kondisi baik	6%	100	6%	50
	Persentase sarana dan prasarana tempat ibadah	0	100	0	50
	Gedung pemerintah dalam kondisi baik	7,10%	100	7,10%	50
	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana gedung kesehatan	0	100	0	50
	Persentase sarana dan prasarana gedung pertemuan	0	100	0	50
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	7%	100	7%	50
	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dibangun	0	100	0	50
	Optimalisasi kinerja sistem air limbah skala kawasan	8,60%	100	8,50%	50
	Tersedianya RTRWK Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi	0	100	1 dok	50
	Rumah tangga pengguna air bersih	7,10%	100	7,10%	50
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	15%	100	10%	50
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	10%	100	10%	50
	Sungai yang dikeruk	10%	100	15%	50
	Luas irigasi dalam kondisi baik	4%	100	4%	50
19	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN</b>				
	Luas Permukiman Kumuh	8%	100	6%	50
	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi baik/layak	70%	100	75%	50
	Persentasi Taman kota yang direhabilitasi	16%	100	18%	50
	Persentasi Tersedianya luasan RTH publik.	24%	100	25%	50
	Persentasi pemeliharaan RTH public	90%	100	90%	50
	Persentasi RTH di DAS	40%	100	45%	50
	Rasio tempat pemakaman umum/satuan penduduk	1835 jiwa/unit	100	2018 jiwa/unit	50
	Pengembangan kota hijau di 5 kecamatan.	1 lokasi	100	2 lokasi	50
	Cakupan layanan Rumah layak huni yang terjangkau	49%	100	50%	50
	Rasio permukiman layak huni	0,76 ha	100	0,84 ha	50
	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	47312 unit	100	47467 unit	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum	73%	100	74%	50
	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	5 unit	100	5 unit	50
	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	19,5%	100	20%	50
	Tersedianya sistem pengangkutan sampah perkotaan	66%	100	69%	50
	Tersedianya Sistem Pengoperasian TPA Sampah	68%	100	69%	50
	Jalan yang terpasang LPJU	88%	100	90%	50
	Tersedianya dekorasi dan asesoris kota (elemen estetika kota)	34%	100	35%	50
	Terpeliharanya dekorasi dan asesoris kota (elemen estetika kota).	34%	100	35%	50
20	<b>DINAS SOSIAL</b>				
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	16%	100	16%	50
	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi di luar panti (orang/keluarga dan/atau kelompok masyarakat)	16%	100	16%	50
	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	100	80%	50
	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	80%	100	80%	50
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	100	60%	50
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	60%	100	60%	50
	Persentase Wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100	100%	50
	Persentase pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial	100%	100	100%	50
	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	16%	100	16%	50
21	<b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN INDUSTRI</b>				
	Besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	90	100	100	50
	Perslisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	4	100	2	50
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	5	100	5	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	20	100	25	50
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50	100	60	50
	Keselamatan dan perlindungan	95	100	100	50
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	80	100	90	50
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	20	100	25	50
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	30%	100	35%	50
	Rasio lulusan S1/S2/S3	18%	100	20%	50
	Cakupan bina kelompok pengrajin	70	100	80	50
22	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
	Partisipasi angkatan kerja perempuan.	68	100	70	50
	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan.	35	100	40	50
	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,074	100	0,072	50
	Cakupan pemakaian kontrasepsi	80	100	80	50
	Persentase yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB (Unmet Need)	12	100	10	50
	Persentase KB Aktif/CPR	80	100	90	50
	Persentase PUS anggota Poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang ber-KB	70	100	80	50
	Angka kelahiran (TFR) per PUS (15-49 tahun)	2,12	100	2,1	50
	Angka Kelahiran Pada remaja usia 15-19 tahun	22	100	20	50
	Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD	40	100	50	50
	Persentase Perempuan di lembaga legislatif	26	100	30	50
	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standart	65	100	80	50
	Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standart	65	100	80	50
	Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	0,6	100	0,2	50
	Tingkat capaian Kota Layak Anak	500 skor	100	600 skor	50
	Persentase Ruang bermain ramah anak sesuai standart	25	100	30	50
23	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>				
	Peningkatan Promosi Produk Pertanian dan perikanan	87,5%	100	100,0%	50
	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	3%	100	3.25%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan pelaku agroindustri binaan	10 usaha	100	10 usaha	50
	Meningkatnya unit usaha olahan asal hewan yang memenuhi standar ASUH	4	100	4	50
	Pengembangan agroindustri di bidang peternakan				
	- Pabrik Susu Mini/Yogurt	1	100	1	50
	- Bakso ayam	1	100	1	50
	- Sosis	1	100	1	50
	Peningkatan produksi ikan dan benih ikan	12	100	14	50
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi	76	100	80	50
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	80	100	82	50
	Peredaran pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan	90	100	100	50
	Pangan olahan yang memenuhi standar keamanan pangan	90	100	100	50
	Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura yang meningkat				
	- Padi (GKP) (kw/ha)	68	100	68	50
	- Jagung (kw/ha)	55	100	55	50
	- Kacang Tanah (kw/ha)	16	100	16	50
	- Kacang Hijau (kw/ha)	12	100	12	50
	- Ubi Kayu (kw/ha)	600	100	600	50
	- Ubi Jalar (kw/ha)	120	100	120	50
	- Bawang merah (kw/ha)	60	100	60	50
	- Cabe merah (kw/ha)	75	100	75	50
	- Sawi (kw/ha)	36	100	36	50
	- Kangkung (kw/ha)	38	100	38	50
	- Bayam (kw/ha)	46	100	46	50
	12. Pengembangan benih/bibit tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi	6	100	7	50
	13. Nilai Tukar Petani (Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan)				
	a. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan	1,25	100	1,3	50
	b. Nilai Tukar Petani Hortikultura	1,25	100	1,3	50
	c. Nilai Tukar Petani Peternakan	1,25	100	1,3	50
	14. Peningkatan Klasifikasi kelompok tani melalui Pembinaan dan Pendampingan Penyuluhan				
	- Pemula	225	100	220	50
	- Lanjut	30	100	35	50
	- Madya	5	100	5	50
	- Utama	0	100	5	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas penyuluh				
	- PNS (Fungsional)	6	100	6	50
	- Non PNS	27	100	27	50
	16. Peningkatan populasi ternak di Kota Tebing Tinggi				
	- Sapi Perah	87	100	87	50
	- Kambing	8563	100	9419	50
	- Domba	6300	100	6300	50
	17. Peningkatan produksi olahan ternak :				
	a. Daging Ternak				
	- Sapi	85	100	90	50
	- Kambing	36	100	38	50
	- Domba	36	100	38	50
	b. Susu Ternak :				
	- Sapi Perah	200000	100	200000	50
	- Kambing Etawah	3000	100	3000	50
	18. Peningkatan produksi ikan dan benih ikan				
	a. Produksi ikan air tawar				
	- Ikan Mas	180	100	190	50
	- Ikan Nila	126	100	128	50
	- Ikan Lele	1800	100	1900	50
	- Ikan Gurami	54	100	56	50
	- Ikan Patin	33	100	38	50
	b. Produksi Benih Ikan Air Tawar :				
	- Ikan Mas	2100	100	2300	50
	- Ikan Nila	3400	100	3700	50
	- Ikan Lele	5500	100	6000	50
	- Ikan Gurami	40	100	45	50
	- Ikan Patin	800	100	900	50
	19. Peningkatan SDM Pengolah dan Pembudidaya Ikan dan Perbenihan				
	- Kelompok Pembudidaya ikan	74	100	88	50
	- Kelompok Unit perbenihan rakyat (UPR)	10	100	11	50
	- Kelompok pengolahan ikan	6	100	7	50
	- Kelompok Pembudidaya Ikan Hias	5	100	6	50
	20. Nilai Tukar Petani Bidang Perikanan	1,25	100	1,3	50
	21. Tingkat Konsumsi ikan per kapita	43	100	44	50
	22. Retribusi Target PAD Rumah Potong Hewan	133	100	134	50
24	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan lingkungan hidup	65%	100	70%	50
	Persentase pengaduan masyarakat akibat pencernaannya yang ditindaklanjuti	100%	100	100%	50
	Nilai Adipura	75,8%	100	76	50
	Parameter tanah yang memenuhi baku mutu	4 kecamatan	100	5 kecamatan	50
	Parameter air yang memenuhi baku mutu	4 sektor	100	4 sektor	50
	Parameter udara yang memenuhi baku mutu	4 sektor	100	4 sektor	50
	Pembangunan rekayasa teknik konservasi tanah	3 kegiatan	100	3 kegiatan	50
	Selisih timbunan sampah	12%	100	10%	50
	Hutan kota yang direhabilitasi	0	0	5 lokasi	50
	Penambahan Hutan Kota	0	0	1 lokasi	50
25	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
	Cakupan Kepemilikan KK	90%	100	95%	50
	Cakupan Penerbitan KTP-el	95%	100	96%	50
	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	96%	100	97%	50
	Persentase Cakupan Kepemilikan KIA	70	100	80	50
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	93%	100	94%	50
	Rasio Bayi Berkata Kelahiran	92%	100	94%	50
	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	90	100	95	50
	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	80	100	90	50
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan Kependudukan	60	100	70	50
26	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN</b>				
	Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	90%	100	100%	50
	Persentase LPM Berprestasi	20%	100	25%	50
	Persentase Posyandu Aktif	100%	100	100%	50
	Cakupan Pembinaan Inovasi dengan Pemanfaatan Potensi Lokal	60%	100	70%	50
	Swadaya Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	70%	100	84%	50
	Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Kelurahan	65%	100	85%	50
	Persentase PKK Aktif	100%	100	100%	50
27	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>				
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.155.527	100	1.242.527	50
	Tersedianya rest area dengan fasilitas penunjang pengguna jalan lainnya	1 lokasi	100	1 lokasi	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	85%	100	90%	50
	Jumlah uji kir angkutan umum	235 unit	100	240 unit	50
	Jumlah terminal angkutan	3 lokasi	100	3 lokasi	50
	Pemasangan rambu-rambu	90%	100	90%	50
	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	5%	100	5%	50
28	<b>DINAS PERDAGANGAN</b>				
	Tersedianya Database dan Pemasaran produk Usaha Mikro berbasis aplikasi	ada	100	ada	50
	Frekuensi mengikuti pameran promosi produk tingkat lokal, regional dan nasional	7 event	100	7 event	50
	Tersedianya sarana dan prasarana promosi produk lokal	1 kegiatan	100	1 kegiatan	50
	Terbentuknya Dewan Perekonomian Daerah	ada	100	ada	50
	Tersedianya data harga bahan pokok dan bahan sinergis lainnya pada aplikasi Siharpanku	ada	100	ada	50
	Pembentukan Satgas monitoring pengawasan dan pengendalian komoditi	1 unit	100	1 unit	50
	Tersedianya Sistem Informasi Perdagangan dan Pusat Pengaduan (Trade Centre dan Command Centre)	ada	100	ada	50
	Persentasi Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah bertanda tera sah yang berlaku	15%	100	20%	50
	Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya sesuai dengan undang-undang metrologi legal	6 kali	100	10 kali	50
	Penyidikan atas pelanggaran undang-undang metrologi legal oleh PPNS Metrologi Legal	-	100	1 kasus	50
	Penyuluhan dan Sosialisasi Gerakan Sadar Metrologi Legal	1 kegiatan	100	1 kegiatan	50
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	24%	100	25%	50
	Jumlah pedagang yang dibina	50 orang	100	50 orang	50
	Tersedianya dana bergulir bagi pelaku usaha mikro dan koperasi	ada	100	ada	50
	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang dibina	80 orang	100	80 orang	50
	Jumlah pasar yang dibangun	-	-	-	-
	Meningkatnya kontribusi retribusi terhadap PAD	800 juta	100	1.000 juta	50
	Jumlah pedagang kaki lima yang membayar retribusi	390 usaha	100	400 usaha	50
	Jumlah koperasi di Kota Tebing Tinggi	244 unit	100	248 unit	50
	Jumlah pelaku usaha sektor kreatif yang dibina	10 orang	100	10 orang	50
	Revitalisasi sarana dan prasarana pasar tradisional	-	-	-	-



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan posko ukur ulang menuju daerah tertib ukur di pasar	1 unit	100	1 unit	50
	Persentasi Koperasi Aktif	42%	100	45%	50
29	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	Buku Kota Dalam Angka	ada	100	ada	50
	Buku PDRB	ada	100	ada	50
	Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi	7 titik	100	7 titik	50
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100	100%	50
	ketersediaan fasilitas jaringan internet di area publik	1 area	100	1 area	50
30	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>				
	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, lingkungan, sosial dan hukum	150	100	200	50
	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	900	100	1000	50
	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	20	100	25	50
	Peresentase organisasi pemuda yang aktif	90	100	100	50
	5. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas moral dan intelektual	500	100	500	50
	6. Persentase wirausaha pemuda	40	100	50	50
	7. Jumlah atlet berprestasi	11	100	12	50
	8. Jumlah prestasi olahraga	5	100	5	50
	9. Cakupan pelatih yang bersertifikasi	75	100	80	50
	10. Cakupan pembinaan olahraga	75	100	80	50
	11. Ketersediaan Kelompok Olahraga Masyarakat	90	100	100	50
	12. Melestarikan Olahraga Tradisional serta Rekreasi	16	100	16	50
	13. Ketersediaan Atlit Disabilitas yang di Bina	80	100	100	50
	14. Jumlah event olahraga masyarakat	10	100	12	50
	15. Apresiasi Pemerintah Kepada Olahragawan dan Pelaku Olahragawan berprestasi Tingkat Propinsi ,Nasional dan International	110	100	150	50
	16. PAD sektor Pariwisata terhadap total PAD	9	100	10	50
	17. Ketersediaan Peraturan Tentang Rencana Induk Pariwisata, Pengembangan Pariwisata Daerah dan Usaha Pariwisata	2	100	2	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
	18. Jumlah Objek Pariwisata Alam	2	100	2	50
	19. Jumlah Objek Pariwisata Buatan	1	100	2	50
	20. Jumlah Usaha Pariwisata	7	100	7	50
	21. Jumlah sarana Prasarana Utama dan Pendukung Pengembangan Industri MICE yang menjadi daya tarik wisatawan	1	100	1	50
	22. Jumlah sistem informasi promosi pariwisata berbasis teknologi informasi.	1	100	1	50
	23. Jumlah event-event kreatif pariwisata lokal	3	100	4	50
	24. Tersedianya landmark kota sebagai daya tarik pariwisata.	3	100	4	50
	25. Jumlah Lembaga Pariwisata	2	100	3	50
	26. Jumlah koordinasi pembangunan kepariwisataan dengan pelaku usaha dan kelembagaan	8	100	10	50
	27. Kunjungan Wisata	8000	100	10000	50
	28. Pembangunan rest area	2	100	3	50
	29. Pembangunan pusat kuliner dan oleh-oleh baru	2	100	2	50
	30. Pengembangan kawasan wisata air disungai padang (batu batang joeang	100	100	100	50
	31. Pengembangan wisata monumen dilapangan merdeka	100	100	100	50
	32. Lapangan olahraga	1	100	1	50
	33. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	8	100	9	50
31	<b>DINAS PERPUSTAKAAN</b>				
	Tersedianya sistem administrasi kearsipan	0 sistem	100	0 sistem	50
	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan supervisi atas pengelolaan arisp dinamis	6 opd	100	6 opd	50
	Jumlah Arsip statis yang diolah	12 dokumen	100	12 dokumen	50
	Jumlah naskah sumber arsip yang diterbitkan	1 dokumen	100	1 dokumen	50
	Jumlah kegiatan peningkatan SDM arsip	2 kegiatan	100	2 kegiatan	50
	Jumlah pengunjung perpustakaan (pemustaka) ke perpustakaan	200.000 orang	100	210.000 orang	50
	Jumlah perpustakaan taman kota/ ruang terbuka publik ditiap kecamatan	4 unit	100	5 unit	50
	Jumlah perpustakaan keliling (Bus Keliling dan Motor Cerdas)	7 unit	100	9 unit	50
	Jumlah perpustakaan umum bacaan masyarakat (rumah baca)	5 unit	100	5 unit	50
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	20.600 judul	100	21.500 judul	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja 2021	Persentase Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja 2022 (Tw II)
1	2	3	4	5	6
32	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU</b>				
	Ketersediaan pelayanan publik dan perizinan berbasis elektronik (e-perizinan).	95%	100	100%	50
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	3,34 Kategori A	100	3,35 Kategori A	50
	Tersedianya Norma Standar Pelayanan (NSP) seluruh jenis perizinan	95%	100	95%	50
	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	5 M	100	5 M	50
	Penerbitan izin	100%	100	100%	50
33	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				
	Persentase Penegakan PERDA	70%	100	75%	50
	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2 kali sehari	100	3 kali sehari	50
	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk.	4. 10000	100	4. 10000	50
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	80%	100%	85%	50%
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80%	100%	85%	50%
	Meningkatnya mental dan fisik yang baik pada personil Satpol PP	140 orang	100	145 orang	50
	Jumlah personil yang mengikuti bimtek	35 orang	100	40 orang	50
	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kota Tebing Tinggi	80%	100	85%	50
	Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	550	100	600	50
34	<b>KECAMATAN BAJENIS</b>				
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33 kegiatan	100	33 kegiatan	50
35	<b>KECAMATAN PADANG HULU</b>				
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33 kegiatan	100	33 kegiatan	50
36	<b>KECAMATAN PADANG HILIR</b>				
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33 kegiatan	100	33 kegiatan	50
37	<b>KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA</b>				
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33 kegiatan	100	33 kegiatan	50
38	<b>KECAMATAN RAMBUTAN</b>				
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33 kegiatan	100	33 kegiatan	50

### 2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

Tujuan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2022 adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 dilaksanakan setiap Triwulan dengan menggunakan Rekapitulasi Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2022 juga dijadikan Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Perubahan APBD 2022.

Pelaksanaan Evaluasi Triwulan II RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2022 untuk melakukan penilaian capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan. Berikut Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program Tahun Anggaran 2022 Kota Tebing Tinggi dan Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berkenaan (Triwulan II) Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Rata-rata Capaian Kinerja Program dan**  
**Predikat Kinerja Program Triwulan II Tahun 2022**  
**Kota Tebing Tinggi**

NO	NAMA SKPD	Target Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	13,78	Sangat Rendah
2.	Dinas Kesehatan	100	53,38	Rendah
3.	RSKP	100	41,67	Sangat Rendah
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	29,67	Sangat Rendah
5.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	100	7,39	Sangat Rendah
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	45,46	Sangat Rendah
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	100	47,63	Sangat Rendah
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	7,65	Sangat Rendah
9.	Dinas Sosial	100	45,87	Sangat Rendah
10.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	100	38,51	Sangat Rendah
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	47,74	Sangat Rendah



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022

NO	NAMA SKPD	Target Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100	67,14	Rendah
13.	Dinas Lingkungan Hidup	100	47,38	Sangat Rendah
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	16,67	Sangat Rendah
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	100	26,60	Sangat Rendah
16.	Dinas Perhubungan	100	24,45	Sangat Rendah
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100	48,28	Sangat Rendah
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100	18,61	Sangat Rendah
19.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	100	3,77	Sangat Rendah
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	100	16,18	Sangat Rendah
21.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	6,30	Sangat Rendah
22.	Sekretariat Dewan	100	23,09	Sangat Rendah
23.	Bag. Kesejahteraan Rakyat	100	33,33	Sangat Rendah
24.	Bagian Umum	100	37,50	Sangat Rendah
25.	Bagian Adm. Pemerintahan	100	40,79	Sangat Rendah
26.	Bagian Perekonomian dan SDM	100	50,00	Sangat Rendah
27.	Bagian Hukum	100	31,25	Sangat Rendah
28.	Bagian Organisasi	100	35,00	Sangat Rendah
29.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	59,26	Rendah
30.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100	30,00	Sangat Rendah
31.	Bagian Pembangunan	100	66,67	Rendah
32.	Kecamatan Rambutan	100	67,71	Rendah
33.	Kecamatan Padang Hulu	100	64,58	Rendah
34.	Kecamatan Padang Hilir	100	67,78	Rendah
35.	Kecamatan Bajenis	100	65,15	Rendah
36.	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	100	64,29	Rendah
37.	Inspektorat	100	21,67	Sangat

NO	NAMA SKPD	Target Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja
				Rendah
38.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	31,56	Sangat Rendah
39.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah	100	31,35	Sangat Rendah
40.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	100	53,22	Sangat Rendah
41.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100	44,32	Sangat Rendah
<b>CAPAIAN KINERJA RKPD 2022 TRIWULAN II</b>		<b>100</b>	<b>38,36</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Berdasarkan target Capaian Kinerja dan realisasi capaian kinerja Program RKPD Tahun Anggaran 2022 Kota Tebing Tinggi sampai dengan Triwulan II, secara umum rata-rata Capaian Kinerja Program RKPD yakni sebesar **38,36 % (Tiga Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Enam Persen)** dapat dikategorikan sangat rendah.

Dari laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi didapat bahwa data capaian program kegiatan, dan sub kegiatan di masing-masing SKPD masih sangat rendah, hal ini berdasar analisa yang dilakukan terjadi karena kemampuan pemahaman pelaksana kegiatan di masing-masing SKPD masih belum optimal, regulasi yang terbit berkaitan capaian tersebut juga mengalami perubahan, factor kemampuan keuangan dalam hal ini percepatan pelaporan dan proses pencairan pada triwulan pertama juga menjadi analisa yang kami lakukan yang menyebabkan capaian menjadi sangat rendah.

Adapun Hasil Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran RKPD**  
**Triwulan II Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi**

NO	NAMA SKPD	Target Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja	Realisasi Penyerapan Anggaran (%)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	13,78	Sangat Rendah	7,57
2.	Dinas Kesehatan	100	53,38	Sangat Rendah	42,54
3.	RSKP	100	41,67	Sangat Rendah	38,49
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	29,67	Sangat Rendah	10,83
5.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	100	7,39	Sangat Rendah	8,58



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022

NO	NAMA SKPD	Target Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja	Realisasi Penyerapan Anggaran (%)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	45,46	Sangat Rendah	35,14
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	100	47,63	Sangat Rendah	39,88
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	7,65	Sangat Rendah	7,64
9.	Dinas Sosial	100	45,87	Sangat Rendah	13,53
10.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	100	38,51	Sangat Rendah	27,89
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	47,74	Sangat Rendah	40,99
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100	67,14	Rendah	27,10
13.	Dinas Lingkungan Hidup	100	47,38	Sangat Rendah	15,25
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	16,67	Sangat Rendah	24,39
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	100	26,60	Sangat Rendah	17,93
16.	Dinas Perhubungan	100	24,45	Sangat Rendah	20,70
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100	48,28	Sangat Rendah	53,17
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100	18,61	Sangat Rendah	30,79
19.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	100	3,77	Sangat Rendah	3,61
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	100	16,18	Sangat Rendah	15,93
21.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	6,30	Sangat Rendah	11,84
22.	Sekretariat Dewan	100	23,09	Sangat Rendah	21,40
23.	Bag. Kesejahteraan Rakyat	100	33,33	Sangat Rendah	13,12
24.	Bagian Umum	100	37,50	Sangat Rendah	36,99
25.	Bagian Adm. Pemerintahan	100	40,79	Sangat Rendah	32,63
26.	Bagian Perekonomian dan SDM	100	50,00	Sangat Rendah	35,11
27.	Bagian Hukum	100	31,25	Sangat Rendah	35,64

NO	NAMA SKPD	Target Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja	Realisasi Penyerapan Anggaran (%)
28.	Bagian Organisasi	100	35,00	Sangat Rendah	13,38
29.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	59,26	Rendah	55,77
30.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100	30,00	Sangat Rendah	3,11
31.	Bagian Pembangunan	100	66,67	Rendah	26,24
32.	Kecamatan Rambutan	100	67,71	Rendah	65,18
33.	Kecamatan Padang Hulu	100	64,58	Rendah	64,49
34.	Kecamatan Padang Hilir	100	67,78	Rendah	66,71
35.	Kecamatan Bajenis	100	65,15	Rendah	65,08
36.	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	100	64,29	Rendah	65,41
37.	Inspektorat	100	21,67	Sangat Rendah	19,56
38.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	31,56	Sangat Rendah	34,16
39.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Daerah	100	31,35	Sangat Rendah	28,14
40.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	100	53,22	Sangat Rendah	21,37
41.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100	44,32	Sangat Rendah	41,68
<b>CAPAIAN KINERJA RKPD 2022 TRIWULAN II</b>		<b>100</b>	<b>38,36</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>30,22</b>

Dari laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi didapat bahwa data capaian program kegiatan, dan sub kegiatan di masing-masing SKPD masih sangat rendah, hal ini berdasar analisa yang dilakukan terjadi karena kemampuan pemahaman pelaksana kegiatan di masing-masing SKPD masih belum optimal, regulasi yang terbit berkaitan capaian tersebut juga mengalami perubahan, factor kemampuan keuangan dalam hal ini percepatan pelaporan dan proses pencairan pada triwulan pertama juga menjadi analisa yang kami lakukan yang menyebabkan capaian menjadi sangat rendah.

#### 2.4 Isu Strategis Permasalahan Pokok Pembangunan di Kota Tebing Tinggi

Potensi permasalahan Pembangunan Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan pokok Kota Tebing Tinggi adalah :

- a. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
  - Belum optimalnya jalan di Kota Tebing Tinggi dalam kondisi mantap

- Belum optimalnya penanganan stunting
- Meningkatnya penduduk miskin karena adanya pandemi *Covid-19*
- b. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
  - Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi
  - Belum adanya pemetaan potensi investasi
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
  - Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
  - Perlunya sosialisasi penanganan epidemic peternakan

Terkait Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi ada beberapa strategi penyelesaian tersebut yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Permasalahan dan Strategi Penyelesaian Pembangunan Daerah**

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI PENYELESAIAAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	<b>Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	
1.1	Belum optimalnya jalan di Kota Tebing Tinggi dalam kondisi mantap	Pemeliharaan dan Peningkatan Kondisi Jalan di Kota Tebing Tinggi yang belum mantap
1.2	Belum optimalnya penanganan stunting	Pembekalan bagi Calon Pengantin (catin), Pemberian makanan tambahan dan Peningkatan sanitasi
1.3	Meningkatnya penduduk miskin karena adanya pandemi <i>Covid-19</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurangan beban masyarakat miskin dengan program bansos dan jaminan social</li> <li>- Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku UMKM</li> </ul>
2	<b>Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	
2.1	Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi	Promosi Bursa Kerja
2.2	Belum adanya pemetaan potensi investasi	Promosi Investasi
3	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	
3.1	Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pembuatan destinasi wisata
3.2	Perlunya penanganan epidemic peternakan	Sosialisasi epidemic peternakan

Dari tabel permasalahan dan strategi penyelesaian permasalahan pembangunan daerah diatas, Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus melakukan perbaikan dalam hal penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan sehingga permasalahan dapat diatasi.

### BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan kerangka implementatif Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro serta realisasi anggaran yang ada untuk dapat dianalisis agar mengetahui kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam membiayai pembangunan.

Bab ini akan memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan dan membahas tentang perkiraan pendapatan. Selanjutnya berdasarkan gambaran kerangka ekonomi yang menggambarkan potensi daerah tersebut akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang harus ditetapkan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam hal kemampuan keuangan daerah, perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor merupakan dasar kebijakan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja secara berdayaguna dan berhasilguna.

### 3.1 Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2017 s/d 2021 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tebing Tinggi beberapa tahun belakangan. Namun tidak terdapat data baik jumlah pedagang maupun omset yang dihasilkan setiap bulannya untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi di tahun 2020 mengalami penurunan dan tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021**

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Kota Tebing Tinggi	5,14	5,17	5,15	-0,7	2,51	2,51
2	Provinsi Sumatera Utara	5,12	5,18	5,22	-1,07	2,61	3,9
3	Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,01

\*Data Sampai Tw I 2022



Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 mencapai 2,51%. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi setelah pemberian vaksin covid-19 tahun 2020 dan 2021. Secara umum, situasi perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 24,45%, sedangkan sector konstruksi memberikan kontribusi sebesar 14,49%. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar lainnya adalah sector industry pengolahan yakni sebesar 12,22%.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi selama periode 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3. 2 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
a	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	65,29	1,27	70,58	1,28	74,27	1,25	78,16	1,29	79,22	1,25
b	Pertambangan dan Penggalian	7,57	0,15	7,84	0,14	8,1	0,14	8,52	0,14	8,96	0,14
c	Industri Pengolahan	681,51	13,30	706,29	12,81	726,29	12,26	724,73	11,98	776,01	12,22
d	Pengadaan Listrik dan Gas	7,16	0,14	7,72	0,14	8,30	0,14	8,72	0,14	9,12	0,14
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Limbah	12,82	0,25	13,3	0,24	13,77	0,23	13,79	0,23	13,99	0,22
f	Konstruksi	740,05	14,45	813,57	14,76	885,21	14,94	860,09	14,22	919,98	14,49
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.126,28	21,98	1.253,05	22,73	1.404,95	23,72	1.453,71	24,03	1.552,48	<b>24,45</b>
h	Transportasi dan Pergudangan	413,33	8,07	439,91	7,98	470,83	7,95	486,66	8,05	505,27	7,96
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	212,39	4,15	227,83	4,13	245,26	4,14	241,13	3,99	241,13	3,80
j	Informasi dan Komunikasi	96,81	1,89	104,01	1,89	113,32	1,91	122,43	2,02	133,88	2,11
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	272,24	5,31	285,76	5,18	293,24	4,95	300,38	4,97	331,4	5,22
l	Real Estat	426,01	8,32	459,4	8,33	491,46	8,30	515,02	8,51	530,97	8,36
m,n	Jasa Perusahaan	24,62	0,48	25,35	0,46	26,57	0,45	27,87	0,46	28,7	0,45
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	611,35	11,93	639,86	11,61	671,4	11,33	697,2	11,53	698,27	11,00
p	Jasa Pendidikan	320,69	6,26	343,91	6,24	369,61	6,24	386,58	6,39	395,68	6,23



Tabel 3. 2 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56,49	1,10	63,22	1,15	68,66	1,16	70,51	1,17	69,93	1,10
r,s,t,u	Jasa Lainnya	48,39	0,94	50,91	0,92	52,97	0,89	53,65	0,89	54,97	0,87
<b>PDRB</b>		<b>5.123,02</b>	<b>100</b>	<b>5.512,52</b>	<b>100</b>	<b>5.924,20</b>	<b>100</b>	<b>6.049,16</b>	<b>100</b>	<b>6.349,95</b>	<b>100</b>



Berdasarkan tabel 3.2 diatas, yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu tahun 2017-2021 masih didominasi sektor yang sama. Lima sektor dominan tersebut secara berturut-turut antara lain:

1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
2. Konstruksi;
3. Industri Pengolahan;
4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan
5. Real Estat.

Besaran distribusi dari kelima sektor terhadap PDRB dari tahun ke tahun cukup stabil. Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kisaran nilai 21% hingga 24%; sektor konstruksi pada kisaran 14%; industri pengolahan pada kisaran 11% hingga 13%; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib pada kisaran 11% dan real estat pada kisaran 8%.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari Rp5.123,02 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp6.349,95 miliar pada tahun 2021.

Sementara kontribusi terkecil pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah pertambangan dan penggalian pada kisaran 0,14% pengadaan listrik dan gas pada kisaran 0,14% dan Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Limbah pada kisaran 0,22%.

Sementara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) setiap tahun pada periode 2017-2021 juga selalu mengalami peningkatan. PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi pada 2017 sebesar Rp3.575,51 miliar, menjadi Rp4.024,78 miliar pada tahun 2021. Secara lengkap PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi selama periode 2017- 2021 tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.3 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
a	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	51,59	4,58	53,70	4,09	55,52	3,38	56,81	2,32	57,13	0,57
b	Pertambangan dan Penggalian	6,06	5,07	6,27	3,40	6,41	2,24	6,65	3,84	6,89	3,60
c	Industri Pengolahan	475,04	2,65	484,84	2,06	493,54	1,79	492,19	-0,27	500,45	1,68
d	Pengadaan Listrik dan Gas	6,91	4,35	7,11	2,95	7,50	5,40	7,88	5,11	8,18	3,76
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Limbah	8,80	6,94	9,07	3,08	9,38	3,36	9,34	-0,42	9,40	0,59
f	Konstruksi	535,08	6,87	564,07	5,42	596,72	5,79	561,39	-5,92	585,59	4,31
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	789,81	8,40	858,97	8,76	934,32	8,77	930,67	-0,39	967,98	4,01
h	Transportasi dan Pergudangan	290,85	7,07	305,25	4,95	320,37	4,95	314,97	-1,69	317,77	0,89
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	159,45	5,27	169,40	6,24	180,49	6,55	176,37	-2,28	176,03	-0,19
j	Informasi dan Komunikasi	92,60	6,07	98,16	6,00	104,04	6,00	111,61	7,27	118,94	6,58
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	175,97	-0,06	179,44	1,98	182,40	1,64	187,70	2,91	198,61	5,81
l	Real Estat	297,08	4,93	307,57	3,53	316,51	2,91	322,81	1,99	323,90	0,34
m,n	Jasa Perusahaan	16,20	2,03	16,45	1,54	16,84	2,34	16,74	-0,60	16,77	0,21
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	369,94	1,13	384,77	4,01	399,44	3,81	397,65	-0,45	398,56	0,23
p	Jasa Pendidikan	219,53	3,89	230,48	4,99	241,99	4,99	245,91	1,62	250,91	2,03



Tabel 3.3 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43,08	7,94	46,25	7,35	48,65	5,19	48,17	-0,99	47,40	-1,60
r,s,t,u	Jasa Lainnya	37,49	3,6	38,69	3,21	39,93	3,21	39,54	-0,99	40,26	1,83
<b>PDRB</b>		<b>3.575,51</b>	<b>5,14</b>	<b>3.760,50</b>	<b>5,17</b>	<b>3.954,03</b>	<b>5,15</b>	<b>3.926,39</b>	<b>-0,70</b>	<b>4.024,78</b>	<b>2,51</b>



Berdasarkan tabel 3.3 di atas, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kontraksi pada dua lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh jasa kesehatan dan kegiatan social sebesar 1,60 persen; diikuti dengan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,19 persen. Kedua lapangan usaha tersebut yang banyak mengalami penurunan disebabkan oleh pandemic covid yang masih berlangsung.

Kontribusi laju pertumbuhan sector pertanian, kehutanan, perikanan mengalami penurunan dari tahun 2019-2021, hal ini menyebabkan kenaikan PDRB ADHK dari sector tersebut tidak signifikan, sehingga kontribusi dalam bentuk persen mengalami penurunan. Hal ini tidak terlepas dari pandemic covid yang berdampak disemua lapangan usaha.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (money follow program priority). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan system Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau system tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang



berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan asset daerah secara professional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, BKP, Obligasi Daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari PAD;
2. Optimalisasi kerjasama dan dukungan pembiayaan pembangunan daerah;

Untuk komponen Pendapatan Daerah merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, besaran Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya.



Tabel 3.4 Proyeksi Perubahan Pendapatan Kota Tebing Tinggi  
Tahun 2022

No	Uraian	JUMLAH		
		APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>725.570.825.807,00</b>	<b>727.510.664.038,00</b>	<b>1.939.838.231,00</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>107.524.586.000,00</b>	<b>105.284.586.000,00</b>	<b>(2.240.000.000,00)</b>
	Pajak daerah	35.301.000.000,00	35.301.000.000,00	-
	Retribusi daerah	5.335.700.000,00	4.115.700.000,00	(1.220.000.000,00)
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	55.887.886.000,00	54.867.886.000,00	(1.020.000.000,00)
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSPER</b>	<b>582.631.731.807,00</b>	<b>586.811.570.038,00</b>	<b>4.179.838.231,00</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	507.994.307.000,00	508.174.145.231,00	179.838.231,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.637.424.807,00	78.637.424.807,00	4.000.000.000,00
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>35.414.508.000,00</b>	<b>35.414.508.000,00</b>	<b>-</b>
	Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.414.508.000,00	35.414.508.000,00	-



Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah rata-rata masih lebih besar disbanding dengan komponen Pendapatan Asli Daerah, sehingga hal ini menjadi tantangan untuk menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang ada.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.



Tabel 3.5 Proyeksi Perubahan Belanja Kota Tebing Tinggi  
Tahun 2022

No	URAIAN	JUMLAH		
		APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA</b>	<b>726.730.425.803,00</b>	<b>745.728.825.089,00</b>	<b>18.998.399.286,00</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>582.926.200.325,00</b>	<b>592.316.317.873,00</b>	<b>9.390.117.548,00</b>
	Belanja Pegawai	335.082.056.090,00	339.165.727.956,00	4.083.671.866,00
	Belanja Barang dan Jasa	238.805.363.635,00	244.809.862.317,00	6.004.498.682,00
	Belanja Bunga	1.423.453.000,00	411.000.000,00	(1.012.453.000,00)
	Belanja Hibah	7.001.743.600,00	7.316.143.600,00	314.400.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	613.584.000,00	613.584.000,00	-
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>127.304.225.478,00</b>	<b>142.172.507.216,00</b>	<b>14.868.281.738,00</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.057.805.056,00	33.750.135.504,00	692.330.448,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.672.248.925,00	32.171.665.965,00	(500.582.960,00)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	57.126.327.997,00	72.010.426.747,00	14.884.098.750,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.447.843.500,00	4.240.279.000,00	(207.564.500,00)
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>16.500.000.000,00</b>	<b>11.240.000.000,00</b>	<b>(5.260.000.000,00)</b>
	Belanja Tidak Terduga	16.500.000.000,00	11.240.000.000,00	(5.260.000.000,00)



Pada tabel 3.5 di atas terlihat bahwa Tahun Anggaran 2022 mengalami penyesuaian terhadap alokasi Belanja Daerah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dapat dilihat bahwa penambahan anggaran lebih besar pada Belanja Modal sebesar Rp. 14.868.281.738,- sedangkan untuk belanja operasi sebesar Rp. 9.390.117.548,-. Dan pengurangan belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.260.000.000,-. Belanja modal tersebut akan kami prioritaskan pada belanja yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Tebing Tinggi.

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena selisih jumlah Pendapatan Daerah lebih kecil daripada Belanja Daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa perhitungan anggaran (SiLPA).

SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.



Tabel 3.6 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Kota Tebing Tinggi  
Tahun 2022

No	Uraian	JUMLAH		
		APBD 2022	Perubahan APBD 2022	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>1.159.599.996,00</b>	<b>8.210.534.746,00</b>	<b>7.050.934.750,00</b>
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>10.400.000.000,00</b>	<b>17.450.934.750,00</b>	<b>7.050.934.750,00</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.400.000.000,00	17.450.934.750,00	7.050.934.750,00
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.240.400.004,00</b>	<b>9.240.400.004,00</b>	-
	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.240.400.004,00	5.240.400.004,00	-



Pada tabel 3.6 diatas, penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 berada pada besaran angka Rp. 17.450.934.750,00 hal ini akan terus menjadi perhatian untuk bagaimana Belanja Daerah yang telah ditetapkan akan terserap sepenuhnya untuk membiayai pembangunan daerah.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Tahun Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi dalam upaya pencapaian visi yaitu *”Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”*. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. **Tebing Tinggi, yaitu** meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Tebing Tinggi dan semua warga yang berkembang hingga sekarang dan berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas fisik dan administratif tertentu yang bersifat sah.
2. **Kota Jasa, yaitu** Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, keuangan, transportasi, komunikasi dan perkantoran yang didukung dengan fasilitas perkotaan modern dan pelayanan publik yang handal. Tebing Tinggi sebagai kota pelayanan jasa didukung dengan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel, didukung dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif dan produktif.
3. **Kota Perdagangan, yaitu** pengembangan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kota Tebing Tinggi dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala Lokal, Nasional, Regional, maupun Internasional. Tebing Tinggi sebagai Kota Perdagangan harus didukung dengan Iklim Penanaman Modal dan bisnis yang kondusif, dan infrastruktur yang akomodatif untuk menunjang kebutuhan infrastruktur Kota perdagangan.
4. **Cerdas, yaitu** menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota *Smart City* berbasis pada penerapan Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat untuk setiap program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik untuk terwujudnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.
5. **Layak, yaitu** layak memiliki makna bahwa Kota Tebing Tinggi layak dihuni oleh seluruh lapisan masyarakat dari balita hingga lanjut usia (lansia) serta bagi para penyandang disabilitas melalui terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan keasrian dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar perkotaan.



6. **Mandiri, yaitu** mengarahkan Kota Tebing Tinggi sebagai kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan pembangunan dan penyediaan pelayanan dasar dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
7. **Sejahtera, yaitu** kesejahteraan menjadi landasan sekaligus tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Maksudnya adalah bahwa setiap produk dan kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus dapat mewujudkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang sejahtera, yakni suatu masyarakat yang secara materi terpenuhi melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan peningkatan pendapatan, kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman masyarakat dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan (disparitas).
8. **Beriman, yaitu** mengarahkan pembangunan kota dengan karakter serta perilaku masyarakat beriman dan bertaqwa sesuai dengan ajaran agamanya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tercipta kesalehan sosial (*religious*) dan tercipta kerukunan antar umat beragama dengan terjalinnya hubungan harmonis antar umat beragama, yang selanjutnya dapat menjadi katalisator pembangunan daerah.
9. **Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, yaitu** mengupayakan terwujudnya masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memiliki kompetensi unggul di beberapa bidang yang sesuai dengan potensi daerah dan mengupayakan adanya program wajib belajar 12 tahun.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya. Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi

Tujuan dan sasaran yang disusun dalam setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

**Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang Baik.**

- Tujuan :**
- Tata Kelola Pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.
  - Kota Tebing Tinggi sebagai *Smart City* yang berbasis Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat.

Pencapaian misi pertama diharapkan bahwa penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat diwujudkan secara professional, taat hukum dan taat asas dengan berbasis pada IT (*Information and Technology*).

Untuk mewujudkan tujuan dari misi 1 tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:



- Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- Peningkatan SDM bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional
- Peran nyata pemerintah di seluruh aspek kehidupan
- Terwujudnya Sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum
- Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel
- Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
- Pelayanan publik berbasis *E-Government*.
- Sistem pelayanan kependudukan terpadu dan berbasis informasi teknologi.
- Sistem aplikasi pelayanan dan perijinan on-line.
- Penyediaan fasilitas jaringan internet.

**Misi 2 : Mewujudkan Tebing Tinggi Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan.**

- Tujuan :**
- Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
  - Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal

Pencapaian misi kedua diharapkan dalam hal ini Pemerintah Kota Tebing Tinggi ingin menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan kota menengah yang menjadi *buffer zone* atau penyangka ekonomi regional dan nasional berbasis pada sektor perdagangan dan jasa di Sumatera Utara dengan melakukan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan RTRW Kota Tebing Tinggi dan mamenuhi standar pelayanan perkotaan.

Untuk mewujudkan tujuan dari misi 2 tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Infrastruktur, sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan.
- Tersedianya sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
- Meningkatnya iklim investasi daerah
- Meningkatnya kapasitas Investasi dalam daerah dalam menyerap tenaga kerja lokal
- Meningkatnya Partisipasi pengusaha Lokal dalam peluang Investasi daerah
- Meningkatnya ketahanan pangan daerah
- Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan komoditi pertanian dan olahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi
- Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan Florikultura
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas ternak



- Terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan

### **Misi 3 : Mewujudkan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa.**

**Tujuan :** - Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah.

Pencapaian misi ketiga ditujukan kepada :

- Meningkatkan Kualitas Pendidikan*, yakni dengan mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter secara terpadu dan terjangkau untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi yang berilmu dan bermoral dengan menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai pedoman untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk atau Bhinneka.
- Meningkatkan Kualitas Kesehatan*, yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas.
- Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, dengan melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM menjadi usaha formal dan maju sehingga dapat berintegrasi dengan kegiatan ekonomi modern dengan memanfaatkan peluang keterbukaan ekonomi secara global dan regional untuk memperluas pasar-pasar produk unggulan UMKM melalui peningkatan efisiensi dan daya saing UMKM dan koperasi dalam kerangka meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional.

Untuk mewujudkan tujuan dari misi 3 tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

- Adanya upaya promotif dan preventif gerakan masyarakat hidup sehat.
- Meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bermutu
- Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan karakter
- Terselenggaranya Pendidikan Non Formal
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan
- Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
- Pemugaran benda-benda bersejarah
- Meningkatnya apresiasi seni dan budaya
- Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar.
- Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
- Pertumbuhan penduduk yang seimbang
- Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
- Adanya upaya perbaikan gizi masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan



- Optimalisasi pelayanan kesehatan
- Pemanfaatan potensi Lokal yang Strategis Sebagai Titik Sentra Segi Tiga Emas.
- Terwujudnya pembangunana karakter pertumbuhan jiwa patriotisme, budaya, prestasi dan profesionalits serta berpartisipasi pemuda
- Terwujudnya pengembangan potensi pemuda dalam bidang kewirausahaan
- Tercapainya Prestasi Olahraga
- Tersedianya tenaga keolahragaan yang berkualitas
- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang olahraga pendidikan, Tradisional Rekreasi, dan kemitraan serta layanan khusus
- Pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan
- Meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan dasar yang bermutu
- Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan karakter
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap bantuan Pendidikan
- Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
- Pemugaran benda-benda bersejarah
- Meningkatnya apresiasi seni dan budaya
- Kebijakan yang mendukung pengembangan usaha pariwisata
- Terwujudnya Sistem Informasi pariwisata
- Terbentuknya sentra-sentra industri rakyat pendukung pariwisata
- Terbentuknya industri kreatif sebagai magnet pariwisata
- Terbangunnya landmark wisata di Kota Tebing Tinggi
- Terbangunnya jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dan kelembagaan kepariwisataan
- Terbangunnya jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dan kelembagaan kepariwisataan
- Terselenggaranya kuantitas dan kualitas atraksi wisata/ daya tarik

#### **Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan**

**Tujuan :** - Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman.

Pencapaian misi keempat Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dengan menyelenggarakan pembangunan kota dan pengelolaan tata ruang berdasarkan prinsip berkelanjutan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan mengembangkan pemukiman sehat dan terjangkau, pengembangan fasilitas pendukung sebagai kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*), pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan fasilitas lainnya meliputi jalan, jembatan, drainase, peningkatan kualitas air minum, perbaikan jaringan transportasi dan utilitas umum lainnya yang modern dan representatif sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Tebing Tinggi

Untuk mewujudkan tujuan dari misi 4 tersebut, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan
- Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga
- Tertatanya kawasan kota secara terpadu berdasar RTRW.
- Terciptanya kawasan ruang terbuka hijau dan hutan kota
- Tertatanya sarana pendukung kota (parkir, rest area, pusat kuliner dan oleh-oleh)
- Meningkatnya kapasitas pelayanan sambungan air bersih
- Terpenuhinya kebutuhan jaringan drainase
- Tertatanya fasilitas sarana dan prasana perhubungan dan transportasi Kota
- Meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum
- Adanya sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi
- Adanya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tebing Tinggi**

<b>VISI: “MENJADIKAN KOTA TEBING TINGGI SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN YANG CERDAS, LAYAK, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERKUALITAS”</b>					
<b>Misi</b>		<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
1.	<b>MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA TEBING TINGGI YANG BAIK</b>	1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas	1.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
				2.	Peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional.
				3.	Peran nyata pemerintah di seluruh aspek kehidupan.
				4.	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum
				5.	Sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab.
				6.	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

<b>VISI: “MENJADIKAN KOTA TEBING TINGGI SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN YANG CERDAS, LAYAK, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERKUALITAS”</b>					
<b>Misi</b>		<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
		2.	Terwujudnya <i>Smart City</i> di Kota Tebing Tinggi yang berbasis Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat.	1.	Pelayanan publik berbasis <i>E-Government</i> .
				2.	Sistem pelayanan kependudukan terpadu dan berbasis informasi teknologi.
				3.	Sistem aplikasi Pelayanan dan Perijinan On-Line
				4.	Penyediaan fasilitas jaringan internet.
2.	<b>MEWUJUDKAN TEBING TINGGI SEBAGAI PUSAT KEGIATAN WILAYAH DAN PERDAGANGAN</b>	1.	Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.	1.	Infrastruktur, sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan.
				2.	Tersedianya sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
				3.	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah.
				4.	Meningkatnya kapasitas investasi daerah dalam menyerap tenaga kerja lokal.
				5.	Meningkatnya partisipasi pengusaha lokal dalam peluang investasi daerah.
		2.	Meningkatkan Ketahanan Pangan, Produktifitas Hasil Pertanian dan Perikanan secara berkelanjutan	1.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
				2.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan komoditi pertanian dan olahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi
				3.	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan florikultura
				4.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas ternak
				5.	Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
3.	<b>MEWUJUDKAN KOTA TEBING TINGGI SEBAGAI KOTA JASA</b>	1.	Terwujudnya Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar mandiri, terpadu dan berkapasitas	1.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
				2.	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
				3.	Adanya upaya promotif dan pereventif gerakan masyarakat

<b>VISI: “MENJADIKAN KOTA TEBING TINGGI SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN YANG CERDAS, LAYAK, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERKUALITAS”</b>					
<b>Misi</b>		<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
			regional.		hidup sehat.
				4.	Adanya upaya perbaikan gizi masyarakat.
				5.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
				6.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
				7.	Adanya upaya perbaikan gizi masyarakat di setiap kecamatan.
				8.	Optimalisasi pelayanan kesehatan.
				9.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang nyaman dan terjaga.
				10.	Pemanfaatan potensi lokal yang strategis sebagai titik sentra segi tiga emas.
				11.	Pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan
				12.	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang
				13.	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
		2.	Terwujudnya sektor pariwisata sebagai penunjang peningkatan keberdayaan, pembangunan dan pendapatan asli daerah.	1.	Kebijakan yang mendukung pengembangan usaha pariwisata.
				2.	Adanya sistem informasi pariwisata.
				3.	Terbentuknya sentra-sentra industri rakyat pendukung pariwisata.
				4.	Terbentuknya sentra-sentra industri rakyat pendukung pariwisata.
				5.	Terbangunnya landmark wisata di Kota Tebing Tinggi.
				6.	Terbangunnya jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dan kelembagaan kepariwisataan.
				7.	Terselenggaranya kuantitas dan kualitas atraksi wisata/daya tarik.
4.	<b>MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DAN</b>	1.	Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana	1.	Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

<b>VISI: “MENJADIKAN KOTA TEBING TINGGI SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN YANG CERDAS, LAYAK, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERKUALITAS”</b>				
<b>Misi</b>		<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	
	<b>PRASARANA PERKOTAAN</b>	prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman.	2.	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga.
			3.	Tertatanya kawasan kota secara terpadu berdasar RTRW.
			4.	Terciptanya kawasan ruang terbuka hijau dan pertamanan baru.
			5.	Tertatanya sarana pendukung kota (parkir, rest area, pusat kuliner dan oleh-oleh).
			6.	Meningkatnya kapasitas pelayanan sambungan air bersih.
			7.	Terpenuhinya kebutuhan jaringan drainase.
			8.	Tertatanya fasilitas sarana dan prasana perhubungan dan transportasi Kota.
			9.	Meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum.
			10.	Adanya Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandarisasi
			11.	Adanya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan
			12.	Perilaku masyarakat berwawasan lingkungan

Terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat didalam RPJMD dan RKPD telah dilakukan kesesuaian, pengendalian dan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang sinergi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pemerintah Sumatera Utara. Tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi dijabarkan ke dalam Sasaran-Sasaran Pembangunan Daerah. Sasaran merupakan hasil atau target yang diharapkan dari suatu tujuan dengan formulasi terukur, spesifik, mudah dicapai serta rasional sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
1.	Tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	persen	50	50	50
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	33	33	50
			Jumlah peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai ASN melalui Tugas belajar dan Pendidikan Kedinasan	orang	10	10	50
			Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti dan lulus sertifikasi diklat kepemimpinan	orang	30	30	50
			Jumlah peningkatan kualitas kompetensi dan kapasitas pegawai ASN melalui Diklat Teknis dan Fungsional	orang	300	300	50
			Persentase pengisian jabatan struktural dan fungsional sesuai kompetensi dan profesionalitas pegawai	Persen	80	80	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			persentase distribusi pegawai ASN yang tepat sasaran	Persen	80	80	50
			persentase tingkat kepatuhan hukum dan disiplin pegawai ASN	Persen	100	100	50
			persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	50
			Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan Bintek tentang pajak daerah	Orang	5	5	50
			Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persen	100	100	50
			Terlaksananya pembayaran non tunai	Persen	100	100	50
			Target pendapatan pajak daerah	Miliar	32	32	50
			Termanfaatnya aset dan sarana prasarana pemerintah daerah	Persen	88	88	50
			Terlaksananya e-budgeting	ADA	Ada	Ada	50
		Peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	60	60	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022	
					2022	P. 2022		
		kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional.	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan BINTEK tentang Pajak daerah	orang	5	5	50	
			Evaluasi perkembangan kelurahan	Persen	80	80	50	
			Persentase seluruh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan analisis jabatan dan analisa beban kerja	Persen	100	100	50	
			Peringatan hari –hari besar keagamaan	Persen	100	100	50	
			Jumlah rumah ibadah yang menyelenggarakan pelatihan bidang agama	Unit	160	160	50	
			Pengembangan Potensi masyarakat dalam bidang Keagamaan dan seni	-	3	3	50	
			Peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	persen	100	100	50	
			Peran nyata pemerintah di seluruh aspek kehidupan.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3.20	3.20	50
				Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey IKM	Persen	100%	100%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Jumlah Organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	Persen	100%	100%	50
			Jumlah Organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP)	Persen	100%	100%	50
			Tingkat akuntabilitas kinerja kondisi awal CC menjadi B	Persen	CC	CC	50
			Persentase paket pengadaan barang/jasa metode pelaksanaan dilakukan melalui pelayanan yang efisien, tranfaran, akuntabel dan profesional berbasis indeks kepuasan layanan masyarakat	Persen	100	100	50
			Terpublikasi dokumen sirup	Persen	100	100	50
			Terjaganya stabilitas harga pangan pokok	Persen	100	100	50
			Termonitornya penyaluran LPG bersubsidi	Persen	100	100	50
			Terkoordinasi dan termonitornya perkembangan perusahaan daerah, koperasi dan UMKM	Persen	100	100	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Sosialisasi pengembangan usaha	Persen	100	100	50
		Sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	50
			Meningkatnya kapasitas SDM mengenai jurnalistik, kehumasan dan keprotokolalan	Persen	75	75	50
			Tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Persen	75	75	50
			Tertingkatnya jumlah partisipasi media jumlah media massa yang mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Persen	85	85	50
			Terpublikasikannya Kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui media pemerintah, media luar ruang dan media elektronik	Persen	85	85	50
			Terlaksananya kerjasama dengan media massa dalam rangka public awareness campaign	Persen	75	75	50
			Persentase tindak lanjut temuan	Persen	91	91	50
			Level Maturitas SPIP	-	4	4	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Persentase penanganan masalah hukum	Persen	100%	100%	50
			Persentase Produk hukum daerah dan kajian Perda yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persen	100%	100%	50
			Persentase Perda dan Perwa yang dihasilkan	Persen	100%	100%	50
			Persentase Produk Hukum Daerah yang selaras dengan Peraturan Perundang-undangan	Persen	100	100	50
			Tersedianya dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	50
			Tersedianya dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	-	ADA	ADA	50
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	50
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	persen	100	100	50
		Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan	Persentase implementasi hasil kesepakatan kerjasama	persen	90	90	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
		responsibel.	Buku Kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	50
			Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	50
			Jumlah pilar batas daerah	Pilar	25	25	50
			Nilai dan pemeringkatan LPPD	Peringkat	3	3	50
			Menghadiri dan mengikuti Rakernas APEKSI	kegiatan	1	1	50
			Evaluasi perkembangan kelurahan	persen	90	90	50
			Cakupan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan.	Persen	95	95	50
			Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemda.	Persen	85	85	50
			Cakupan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	90	90	50
			Persentase LPM Berprestasi	persen	20	20	50
			Persentase Posyandu Aktif	persen	100	100	50
			Terlaksanya kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH	Persen	100	100	50
			Tersedianya sistem Administrasi kearsipan	Sistem	0	0	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Jumlah Perangkat daerah yang mendapat supervisi atas pengolahan arsip dinamis	OPD	6	6	50
			Jumlah arsip statis yang diolah	Dokumen	12	12	50
			Jumlah naskah sumber arsip yang ditertibkan	Dokumen	1	1	50
			Jumlah kegiatan peningkatan SDM arsip	Kegiatan	1	1	50
			terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	persen	100	100	50
			terlaksananya pembayaran non tunai	persen	100	100	50
			peningkatan target pendapatan pajak daerah	miliar	32	32	50
			meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah	persen	70	70	50
			terlaksananya e-budgeting	persen	100	100	50
			peningkatan pelayanan pajak daerah melalui e-pajak	persen	100	100	50
		Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.	Persentase Penegakan PERDA	Persen	70	70	50
			Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kali sehari	2	2	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk.		4:10000	4:10000	50
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	Persen	80	80	50
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	80	80	50
			Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	Persen	100%	100%	50
			Persentase Produk Hukum yang dapat diakses melalui Internet oleh pegawai Pemerintah dan masyarakat	Persen	100%	100%	50
		Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional	Meningkatnya mental dan fisik yang baik pada personil Satpol PP	Orang	140	140	50
			Jumlah personil yang mengikuti bimtek	Orang	35	35	50
	Kota Tebing Tinggi sebagai Smart City yang berbasis Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat.	Pelayanan publik berbasis <i>e-government</i> .	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan	persen	100	100	50
			Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi	Titik	7	7	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi e-kecamatan dan e-kelurahan.	persen	80	80	50
		Sistem pelayanan kependudukan terpadu dan berbasis informasi teknologi.	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	persen	95	95	50
			Rasio bayi ber Akte kelahiran	Persen	92	92	50
			Cakupan kepemilikan KK	Persen	90	90	50
			Cakupan penerbitan KTP – el	Persen	95	95	50
			Persentase cakupan kepemilikan KIA	Persen	70	70	50
			Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	92	92	50
			Cakupan penerbitan akta perkawinan	Persen	90	90	50
			Cakupan penerbitan akta kematian	Persen	80	80	50
			Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) layanan kependudukan	Persen	60	60	50
		Sistem aplikasi pelayanan dan perijinan on-line	Ketersediaan pelayanan publik dan perizinan berbasis elektronik (e-perizinan).	Persen	95	95	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
		Penyediaan fasilitas jaringan internet.	Ketersediaan fasilitas jaringan internet di area publik	area	1	1	50
2	Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.	Infrastruktur, sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan.	Pertumbuhan Industri	persen	8	8	50
			Terpromosinya potensi daerah	Persen	100	100	50
			Terlaksananya operasi pasar	Persen	100	100	50
			Tersedianya Database dan Pemasaran produk Usaha Mikro berbasis aplikasi	Ada	Ada	Ada	50
			Frekuensi mengikuti pameran promosi produk tingkat lokal, regional dan nasional	Event	7	7	50
			Tersedianya sarana dan prasarana promosi produk lokal	Kegiatan	1	1	50
			Terbentuknya Dewan Perekonomian Daerah	Ada	Ada	Ada	50
		Tersedianya sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu.	Survey kepuasan masyarakat (SKM)	Skor	3,34 kategori A	3,34 kategori A	50
			Tersedianya norma standar pelayanan (NSP) seluruh jenis perizinan	Persen	80	80	50
			Meningkatnya iklim investasi daerah.	partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	68	68



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	persen	35	35	50
			Unjuk Rasa	Kasus	17	17	50
			Jumlah masalah terkait ketahanan bangsa	masalah	0	0	
			Jumlah insiden yang diakibatkan masalah perbedaan agama.	masalah	0	0	
			Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	1	1	50
			Persentase LSM aktif	persen	51	51	50
			Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	1	1	50
			Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kota Tebing Tinggi	persen	80	80	50
			Hearing Dialog antara Pejabat Daerah / Tokoh Masyarakat, dan tokoh Agama.	kali	4	4	50
			Peningkatan Promosi Produk Pertanian dan perikanan	persen	87.5	87.5	50
			Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	3	3	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Peningkatan pelaku agroindustri binaan	Usaha	10	10	50
			Meningkatnya unit usaha olahan asal hewan yang memenuhi standar ASUH	Usaha	4	4	50
			Pengembangan agroindustri di bidang peternakan				
			- Pabrik Susu Mini/Yogurt	Unit	1	1	50
			- Bakso Ayam	Unit	0	0	50
			- Sosis	Unit	1	1	50
			Peningkatan produksi ikan dan benih ikan	Pelaku Usaha	12	12	50
			Terlaksananya Operasional Pendistribusian RASTRA	Persen	100	100	50
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar	5	5	50
		Meningkatnya partisipasi pengusaha lokal dalam peluang investasi daerah.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	persen	14	14	50
			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	24%	24%	50
			Jumlah pedagang yang dibina	orang	50	50	50
			Penerbitan izin	Persen	100	100	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
	Meningkatkan Ketahanan Pangan, Produktifitas Hasil Pertanian dan Perikanan secara berkelanjutan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi	Nilai	76	76	50
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	Nilai	80	80	50
		Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan komoditi pertanian dan olahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi	Peredaran pangan segar yang memenuhi standar keamanan pangan	Persen	90	90	50
			Pangan olahan yang memenuhi standar keamanan pangan	Persen	95	95	50
		Meningkatnya produksi tanaman Pangan, Hortikultura dan Florikultura	Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura yang meningkat				
			- Padi (GKP)	kw/ha	67	67	50
			- Jagung	kw/ha	54	54	50
			- Kacang Tanah	kw/ha	16	16	50
			- Kacang Hijau	kw/ha	12	12	50
			- Ubi Kayu	kw/ha	500	500	50
			- Ubi Jalar	kw/ha	120	120	50
			- Bawang Merah	kw/ha	60	60	50
			- Cabe Merah	kw/ha	74	74	50
			- Sawi	kw/ha	35	35	50
- Kangkung	kw/ha	37	37	50			
- Bayam	kw/ha	45	45	50			



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Pengembangan benih/bibit tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi	Jenis	6	6	50
			Nilai Tukar Petani (NTP) :				
			- NTP Tanaman Pangan	Nilai	1.25	1.25	50
			- NTP Tanaman Hortikultura	Nilai	1.25	1.25	50
			- NTP Peternakan	Nilai	1.25	1.25	50
			Peningkatan Klasifikasi kelompok tani melalui Pembinaan dan Pendampingan Penyuluhan				
			- Pemula	Kelompok	230	230	50
			- Lanjut	Kelompok	30	30	50
			- Madya	Kelompok	5	5	50
			- Utama	Kelompok	0	0	50
			Meningkatnya kualitas dan kapasitas penyuluh				
			- PNS (Fungsional)	Orang	6	6	50
			- Non PNS	Orang	27	27	50
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas ternak	Peningkatan populasi ternak di Kota Tebing Tinggi				
			- Sapi Perah	Ekor	87	87	50
			- Kambing	Ekor	8563	8563	50
			- Domba	Ekor	6350	6350	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Peningkatan produksi olahan ternak :				
			a. Daging Ternak				
			- Sapi	ton	85	85	50
			- Kambing	ton	36	36	50
			- Domba	ton	36	36	50
			b. Susu Ternak				
			- Sapi Perah	Liter	200000	200000	50
			- Kambing Etawa	Liter	3000	3000	50
		Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan	Peningkatan produksi ikan dan benih ikan				
			a) Produksi Ikan Tawar:				
			- Ikan Mas	ton	180	180	50
			- Ikan Nila	ton	126	126	50
			- Ikan Lele	ton	1800	1800	50
			- Ikan Gurami	ton	54	54	50
			- Ikan Patin	ton	33	33	50
			b) Produksi Benih Ikan Air Tawar				
			- Ikan Mas	Ekor (ribu)	2100	2100	50
			- Ikan Nila	Ekor (ribu)	3400	3400	50
			- Ikan Lele	Ekor (ribu)	5500	5500	50
			- Ikan Gurami	Ekor (ribu)	40	40	50
			- Ikan Mas	Ekor (ribu)	800	800	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Peningkatan SDM Pengolah dan Pembudidaya Ikan dan Perbenihan				
			- Kelompok Pembudidaya ikan	Kelompok	74	74	50
			- Kelompok Unit perbenihan rakyat (UPR )	Kelompok	10	10	50
			- Kelompok pengolahan ikan	Kelompok	6	6	50
			- Kelompok Pembudidaya Ikan Hias	Kelompok	5	5	50
			Nilai Tukar Petani Bidang Perikanan	Nilai	1.25	1.25	50
			Tingkat Konsumsi ikan per kapita	kg/kap/thn	43	43	50
	Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal	Meningkatnya kapasitas investasi daerah dalam menyerap tenaga kerja lokal	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	persen	90	90	50
			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	persen	4	4	50
			Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	persen	5	5	50
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	20	20	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	50	50	50
			Keselamatan dan perlindungan	persen	95	95	50
			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	persen	80	80	50
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	persen	20	20	50
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	persen	30	30	50
			Rasio lulusan S1/S2/S3	persen	18	18	50
			Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	70	70	50
3.	Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar mandiri, terpadu dan berkapasitas regional.	Meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bermutu	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima beasiswa untuk peningkatan pendidikan formal dan non formal	Orang	4 Orang	4 Orang	50
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan yang Berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Orang	300 Orang	300 Orang	50
			Tambahan penghasilan Pendidik dan Tenaga kependidikan	Persen	20%	20%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Prestasi Pendidik dan Siswa yang di peroleh pada tingkat Internasional, Nasional dan Regional	Orang	4 Orang	4 Orang	50
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	-2%	-2%	50
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan Paket A	Persen	-2%	-2%	50
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan Paket A	Persen	0,50%	0,50%	50
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP dan Paket B	Persen	-2%	-2%	50
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan Paket B	Persen	1,00%	1,00%	50
			Penerima Beasiswa bagi Siswa yang di kategorikan Mampu/Miskin	Orang	14456 Orang	14456 Orang	50
			Alat Praktik dan Media Pembelajaran	Jenis	7 Jenis	7 Jenis	50
			Meubiler ruang kelas dan ruang penunjang lainnya	Persen	7%	7%	50
			Gedung dan Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	Persen	6%	6%	50
			Ketersediaan Ruang Penunjang (Perpustakaan, Laboratorium, Ruang Guru, Ruang UKS, Jamban, RTH, dll) di setiap satuan pendidikan	Persen	8%	8%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Data Pokok Pendidikan	Persen	4%	4%	50
			Kemampuan TIK bagi Pendidik dan Kependidikan	Persen	8%	8%	50
			Sekolah yang Memiliki Website	SKLH	10 SKLH	10 SKLH	50
			Penerapan e-pembelajaran	Persen	8%	8%	50
			Kurikulum muatan lokal	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	50
		Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan karakter	Implementasi pelaksanaan pendidikan karakter.	SKLH	20 Sklh	20 Sklh	50
		Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas	Persen	0,0003	0,0003	50
			Pelatihan Kecakapan Hidup bagi Masyarakat	KGT	1 Kgt	1 Kgt	50
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan	Lulusan SMA/MA, dan SMK yang mendapat beasiswa yang di terima di PTN	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	50
			Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi	Orang	100 Orang	100 Orang	50
		Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat	Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung pada Laboratorium Terpadu Kota Tebing Tinggi	Persen	6%	6%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Ketersediaan Perlengkapan dan Alat Praktek pada Laboratorium Terpadu Kota Tebing Tinggi	Mapel	1 Mapel	1 Mapel	50
			Pendirian Politeknik Negeri	Kampus	-	-	
		Pemugaran benda-benda bersejarah	Cagar Budaya, Benda Bersejarah, dan Kesenian Daerah yang dilindungi	Jenis	1 Jenis	1 Jenis	50
			Sanggar Seni dan Budaya	Unit	1 Unit	1 Unit	50
			Pakaian Tari	Set	1 Set	1 Set	50
			Alat Seni Musik	Set	1 Set	1 Set	50
		Meningkatnya apresiasi seni dan budaya	Pagelaran Seni dan Budaya	Pagelaran	1 Pagelaran	1 Pagelaran	50
			Festival Seni dan Budaya	Festival	1 Festival	1 Festival	50
		Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil.	persen	100%	100%	50
			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin.	persen	100%	100%	50
			Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	persen	100%	100%	50
			cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	100%	100%	50



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	100%	100%	50
			Jumlah Kematian Ibu	orang	3 orang	3 orang	50
			Angka kematian Bayi		4.9/1000 kh	4.9/1000 kh	50
			Persentase pelayanan kesehatan balita.	persen	100%	100%	50
			cakupan kunjungan bayi	persen	95%	95%	50
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	persen	100%	100%	50
			Persentase sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 20 jam.	persen	80%	80%	50
			Rasio jumlah tenaga kesehatan puskesmas sesuai dengan standar.	persen	75%	75%	50
			Rasio jumlah tenaga kesehatan rumah sakit sesuai dengan standar.	persen	100%	100%	50
			Persentase Kunjungan Rawat jalan	persen	35%	35%	50
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	persen	100%	100%	50
			Persentase Puskesmas Terakreditasi	persen	80	80	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Persentase Rumah Sakit Pemerintah dan swasta terakreditasi	persen	80%	80%	50
			Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar pelayanan Minimal.	persen	100%	100%	50
		Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Persentase pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	persen	100%	100%	50
			Persentase sarana pelayanan kesehatan yang melayani program BPJS	persen	100%	100%	50
			Persentase kepersertaan BPJS	persen	89%	89%	50
			cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100%	100%	50
		Adanya upaya promotif dan preventif gerakan masyarakat hidup sehat.	Persentase tenaga promosi kesehatan di puskesmas yang mendapat pelatihan	persen	90%	90%	50
			Jumlah Kelurahan yang mendapat sosialisasi Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	kelurahan	25 kelurahan	25 kelurahan	50
			Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan cuci tangan pakai sabun (CTPS)	sekolah	100 sekolah	100 sekolah	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan dasar	persen	80%	80%	50
			Jumlah Pos UKK yang terbentuk diwilayah puskesmas	puskesmas	8 puskesmas	8 puskesmas	50
			Persentase Jamaah Haji yang diperiksa kebugaran jasmani	persen	100%	100%	50
			Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD	persen	80%	80%	50
			persentase pelayanan kesehatan orang dengan TB	persen	100%	100%	50
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	persen	100%	100%	50
			Persentase pengendalian penyakit Demam Berdarah (DBD)	persen	100%	100%	50
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif.	persen	100%	100%	50
			Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	persen	100%	100%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.	persen	100%	100%	50
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.	persen	100%	100%	50
			Persentase Instansi dan institusi pendidikan yang melaksanakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok)	persen	80%	80%	50
			Persentase kelurahan yang melaksanakan pembinaan kota sehat	persen	90%	90%	50
			Persentase Sarana Sanitasi Dasar Memenuhi Syarat	persen	95%	95%	50
			Semua kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	persen	95%	95%	50
		Adanya upaya perbaikan gizi masyarakat.	Prevalensi balita gizi buruk(%)		0,06	0,06	50
			persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%	100%	50
			persentase balita yang ditimbang berat badannya	persen	84%	84%	50
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	persen	42%	42%	50
			Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium	persen	100%	100%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	persen	94%	94%	50
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambahan darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan	persen	95%	95%	50
			Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	persen	70%	70%	50
			Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	persen	95%	95%	50
			Persentase remaja putri tablet tambah darah	persen	45%	45%	50
			Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin	persen	97%	97%	50
			Persentase bayi baru lahir mendapat IMD	persen	95%	95%	50
			persentase balita mempunyai buku KIA/KMS	persen	100%	100%	50
			Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	persen	99%	99%	50
			Persentase usia dibawah 2 tahun yang mendapat imunisasi lanjutan.	persen	100%	100%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Persentase anak sekolah dasar yang mendapat imunisasi.	persen	100%	100%	50
			Persentase penyakit yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	persen	100%	100%	50
			Persentase calon Jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan.	persen	100%	100%	50
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen	100%	100%	50
		Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	Cakupan ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	persen	95%	95%	50
			Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	persen	75%	75%	50
			Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar permenkes	persen	90%	90%	50
			Persentase sarana produksi dan distribusi makanan dan minuman	persen	95%	95%	50
			Persentase sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional dan kosmetik	persen	90%	90%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
		Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan.	Persentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar permenkes.	persen	100%	100%	50
		Optimalisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan status rumah sakit pemerintah	Kelas	B Pendidikan	B Pendidikan	50
			Peningkatan status akreditasi rumah sakit		Paripurna	Paripurna	50
			Persentase kemampuan rumah sakit dalam pembiayaan operasional secara mandiri dengan pola PPK-BLUD Rumah sakit Pemerintah	Persen	80	80	50
		Pemanfaatan potensi Lokal Yang Strategis Sebagai Titik Sentra Segi Tiga Emas	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	40	40	50
			Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	1.155.527	1.155.527	50
			Retribusi Target PAD Rumah Potong Hewan	Juta	133	133	50
			Cakupan Pembinaan Inovasi dengan Pemanfaatan Potensi Lokal	Persen	60	60	50
			Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang dibina	ORG	80 ORG	80 ORG	50
			Jumlah pasar yang dibangun	UNIT	-	-	50
			Meningkatnya kontribusi retribusi terhadap PAD	Jt	800 jt	800 jt	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Jumlah pedagang kaki lima yang membayar retribusi	Usaha	390 usaha	390 usaha	50
			Jumlah koperasi di Kota Tebing Tinggi	Unit	244 unit	244 unit	50
			tersedinya dana bergulir bagi pelaku usaha mikro dan koperasi	Ada	Ada	Ada	50
		Pembangunan, Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dengan secara berkeadilan	1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	16	16	50
			2. Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi di luar panti (orang/keluarga dan/atau kelompok masyarakat)	Persen	16%	16%	50
			3. Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	80%	80%	50
			4. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	80%	80%	50
			5. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	60%	60%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			6. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	persen	60%	60%	50
			7. Persentase Wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	100%	100%	50
			8. Persentase pejuang perintiskemerdekaan dan keluarga pahlawan yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial	persen	100%	100%	50
			Swadaya Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	70	70	50
			Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Kelurahan	Persen	65	65	50
			Jumlah kunjungan Perpustakaan	Kunjungan	200.000	200.000	50
			Pengembangan perpustakaan taman kota/ruang terbuka publik di setiap kecamatan	Unit	4	4	50
			Jumlah perpustakaan keliling	Unit	7	7	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022	
					2022	P. 2022		
			Jumlah perpustakaan umum bacaan masyarakat	Unit	5	5	50	
			Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	22.000	22.000	50	
		Pertumbuhan penduduk yang seimbang	persentase laju pertumbuhan penduduk	persen	0,074	0,074	50	
			cakupan pemakaian kontrasepsi	persen	80	80	50	
			persentase tidak terpenuhi kebutuhan ber KB ( Unmet Need)	persen	12	12	50	
			persentase KB aktif/ CPR	persen	75	75	50	
			persentase PUS anggota POKTAN, BKB, BKR, BKL, UPPKS yang Ber-KB	persen	70	70	50	
			angka kelahiran (TFR) Perpus 15-49 tahun	Angka Lahir Hidup	2,12	2,12	50	
			angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun	Angka Lahir Hidup	22	22	50	
			Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD	persen	40%	40%	50
				Persentase Perempuan di lembaga legislatif	persen	26%	26%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standart	persen	65%	65%	50
			Persentase anak korban kekerasan yang terlayani sesuai standart	persen	65%	65%	50
			Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	persen	0,60%	0,60%	50
			Tingkat capaian Kota Layak Anak	skor	500 skor	500 skor	50
			Persentase Forum Anak yang terbentuk (Kota, Kecamatan dan Kelurahan)	persen	16%	16%	50
	Terwujudnya Efektifitas Pelayanan dan Prestasi Pemuda	Terwujudnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas serta partisipasi pemuda	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, lingkungan, sosial dan hukum	Orang	150	150	50
			Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	Orang	900	900	50
			Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	20	20	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Peresentase organisasi pemuda yang aktif	Persentase	90	90	50
			Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas moral dan intelektual	Orang	500	500	50
		Terwujudnya Pengembangan Potensi Pemuda dalam Bidang Kewirausahaan	Persentase wirausaha pemuda	Persentase	40	40	50
	Terwujudnya Pembinaan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi dalam berbagai cabang olahraga secara terus menerus dan berkelanjutan.	Tercapainya prestasi olahraga	Jumlah atlet berprestasi	Cabor perorangan	11	11	50
			Jumlah Prestasi olahraga	Cabor beregu	5	5	50
	Terwujudnya kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan agar menjadi tenaga keolahragaan yang dapat diandalkan baik bagi kepentingan Kota Tebing Tinggi, nasional maupun internasional.	Tersedianya Tenaga Keolahragaan yang berkualitas.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	75	75	50
			Cakupan pembinaan olahraga	Persen	75	75	50
	Terwujudnya Pemassalan Olahraga	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Olahraga	Ketersedian Kelompok Olahraga Masyarakat	Club olahraga masyarakat	90	90	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
		Pendidikan, Tradisional Rekreasi, dan Kemitraan Serta Layanan Khusus	Melestarikan Olahraga Tradisional serta Rekreasi	Cabor Olahraga Tradisional	16	16	50
			Ketersediaan Atlit Disabilitas yang di Bina	Atlit difabel	80	80	50
			Jumlah event olahraga masyarakat	event	10	10	50
			Apresiasi Pemerintah Kepada Olahragawan dan Pelaku Olahragawan berprestasi Tingkat Propinsi, Nasional dan International	Orang	110	110	50
		Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Persentase laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,074	0,074	50
		Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase perempuan di lembaga legislatif	Persen	26%	26%	50
			Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	50
	Sektor pariwisata sebagai penunjang peningkatan keberdayaan, pembangunan dan pendapatan asli daerah.	Kebijakan yang mendukung pengembangan usaha pariwisata.	PAD sektor Pariwisata terhadap total PAD	persen	9	9	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Ketersediaan Peraturan Tentang Rencana Induk Pariwisata, Pengembangan Pariwisata Daerah dan Usaha Pariwisata	Peraturan	2	2	50
			Jumlah Objek Pariwisata Alam	Unit	2	2	50
			Jumlah Objek Pariwisata Buatan	Lokasi	1	1	50
			Jumlah Usaha Pariwisata	Unit	7	7	50
			Jumlah sarana Prasarana Utama dan Pendukung Pengembangan Industri MICE yang menjadi daya tarik wisatawan	Sarana/Prasarana	1	1	50
		Terwujudnya sistem informasi pariwisata.	Jumlah sistem informasi promosi pariwisata berbasis teknologi informasi.	sistem informasi	1	1	50
			Jumlah event-event kreatif pariwisata lokal	Event	3	3	50
		Terbentuknya sentra-sentra industri rakyat	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	80	80	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
		pendukung pariwisata.	Persentase PMKS yang menerima program pembayaran sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	16	16	50
		Terbentuknya industri kreatif sebagai magnet pariwisata.	Persentase UKM non BPRm	persen	90	90	50
			Jumlah pelaku usaha sektor kreatif yang dibina	Org	10 Org	10 Org	50
		Terbangunnya landmark wisata di Kota Tebing Tinggi.	Tersedianya landmark kota sebagai daya tarik pariwisata.	landmark	3	3	50
		Terbangunnya jaringan kemitraan dengan Pelaku Usaha dan Kelembagaan kepariwisataan.	Jumlah Lembaga Pariwisata	Lembaga	2	2	50
			Jumlah koordinasi pembangunan kepariwisataan dengan pelaku usaha dan kelembagaan	koordinasi	8	8	50
		Terselenggaranya kuantitas dan kualitas atraksi wisata/daya tarik.	Kunjungan Wisata	Orang	8000	8000	50
4.	Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak,	Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	92,9	92,9	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
	aksesibel, aman dan nyaman.	berkualitas dan berkelanjutan.	Jumlah sertifikat tanah yang didaftarkan	persen	0	0	50
			Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota	Km	232.05	232.05	50
			Jembatan yang dibangun	Unit	19	19	50
			Terbangunnya flyover pada perlintasan sebidang Jalan Sudirman-Jalan H.M. Yamin	Persen	80	80	50
			Terbangunnya jalan lingkar (Jalan Baja-Jalan Syech Beringin-Jalan Abdul Hamid-Jalan Asrama-Persiakan-Tualang-Lubuk Baru)	Km	12	12	50
			Kondisi Alat-alat berat dalam kondisi baik	Persen	74	74	50
			Persentase sarana dan prasarana tempat ibadah	Persen	-	-	
			Gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persen	68,9	68,9	50
			Jumlah fasilitas sarana dan prasarana gedung kesehatan	Unit	-	-	
			Persentase sarana dan prasarana gedung pertemuan	Persen	-	-	



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	52,5	52,5	50
			Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dibangun	Unit	-	-	
			Optimalisasi kinerja sistem air limbah skala kawasan	Persen	91,5	91,5	50
			Tersedianya RTRWK Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi	Dokumen	-	-	
			Rumah tangga pengguna air bersih	Persen	57,9	57,9	50
			Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	80	80	50
			Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	Persen	75	75	50
			Sungai yang dikeruk	Persen	70	70	50
			Luas irigasi dalam kondisi baik	Persen	86	86	50
			Persentase Ruang bermain ramah anak sesuai standart	Persen	25	25	50
			Persentase layanan kesehatan (puskesmas dan Rumahsakit) Ramah Anak sesuai standart	persen	35%	35%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Persentase Sekolah Ramah Anak sesuai standart	persen	35%	35%	50
		Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	92	92	50
			Jumlah masyarakat yang paham dalam antisipasi bencana kebakaran	Orang	550	550	50
			Penambahan sarana dan prasarana penanggulangan bencana baru	Jenis	4 jenis	4 jenis	50
			Perawatan rutin sarana dan prasarana penanggulangan bencana	persen	100,00%	100,00%	50
			Luas Permukiman Kumuh	persen	8%	8%	50
			Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi baik/layak	persen	70%	70%	50
			Pengembangan kota hijau di 5 kecamatan	lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	50
			Taman kota yang direhabilitasi	persen	16%	16%	50
			Persentasi Tersedianya luasan RTH publik.	persen	24%	24%	50
			Persentasi pemeliharaan RTH public	persen	90%	90%	50
			Persentasi RTH di DAS	persen	40%	40%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Rasio tempat pemakaman umum/satuan penduduk.	jiwa/unit	1835 jiwa/unit	1835 jiwa/unit	50
			Cakupan layanan Rumah layak huni yang terjangkau.	persen	49%	49%	50
			Rasio permukiman layak huni	ha	0,76 ha	0,76 ha	50
			Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	unit	47467 unit	47467 unit	50
			Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum	persen	73%	73%	50
			selisih timbunan sampah di TPA	persen	12%	12%	50
			1. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	unit	5 unit	5 unit	50
			2. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	persen	19,50%	19,50%	50
			3. Tersedianya sistem pengangkutan sampah perkotaan	persen	66%	66%	50
			4. Tersedianya Sistem Pengoperasian TPA Sampah	persen	68%	68%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Pembangunan infrastruktur mitigasi banjir	paket	3 paket	3 paket	50
			Tersedianya personil dan unit pelaksana operasional penanggulangan bencana dan posko kesiapsiagaan	orang	90 Orang	90 Orang	50
			Event Pelatihan dalam Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat dan Petugas	orang	270 orang	270 orang	50
			Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	2 Desa	2 Desa	50
			Presentase Korban yang diberikan bantuan	persen	85%	85%	50
		Tertatanya kawasan kota secara terpadu berdasar RTRW.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	95	95	50
		Perilaku masyarakat berwawasan lingkungan	Persentase peserta penyuluhan yang hadir	Persen	65	65	50
			Persentase pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	50
			Parameter tanah yang memenuhi baku mutu	Kecamatan	4	4	50
			Parameter air yang memenuhi baku mutu	Sektor	4	4	50
			Parameter udara yang memenuhi baku mutu	Sektor	4	4	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Pembangunan rekayasa teknik konservasi tanah	Kegiatan	3	3	50
			Selisih timbunan sampah	Persen	12	12	50
			Nilai Adipura		75,8	75,8	50
			Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan lingkungan hidup	persen	65	65	50
		Terciptanya kawasan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota	Hutan kota yang direhabilitasi	Lokasi	0	0	0
			Penambahan hutan kota	Lokasi	0	0	0
		Meningkatnya kapasitas pelayanan sambungan air bersih.	Cakupan layanan teknis air bersih	Persen	100.00	100.00	50
		Tertatanya fasilitas sarana dan prasana perhubungan dan transportasi Kota.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	85	85	50
			Jumlah uji kir angkutan umum	angkutan	235	235	50
			Jumlah terminal angkutan	Lokasi	3	3	50
			Pemasangan rambu-rambu	persen	90	90	50
			Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Persen	5%	5%	50
		Meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum.	Jalan yang terpasang LPJU.	Persen	88	88	50
			Tersedianya dekorasi dan asesoris kota (elemen estetika kota)	Persen	34%	34%	50



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target		Persentase Rata-rata Capaian s/d Tw II Tahun 2022
					2022	P. 2022	
			Terpeliharanya dekorasi dan asesoris kota (elemen estetika kota).	Persen	34%	34%	50
		Tertatanya sarana pendukung kota (parker, rest area, pusat kuliner dan oleh-oleh	Pembangunan rest area dengan fasilitas penunjang pengguna jalan lainnya	Lokasi	1	1	50
			Pembangunan pusat kuliner dan oleh-oleh baru	Lokasi	2	2	50
			Pengembangan kawasan wisata air disungai padang (batu batang joeang	Persen	100	100	50
			Pengembangan wisata monumen dilapangan merdeka	Persen	100	100	50
		Terwujudnya sarana dan prasarana Olahraga yang terstandarisasi	Lapangan olahraga	unit	1	1	50
			Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Unit	8	8	50

#### 4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Untuk mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional, maka dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, dengan Tema Pembangunan Nasional yaitu ***“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”***. Untuk menjawab isu-isu strategis Tahun 2022 ditetapkan 10 (sepuluh) Fokus Pembangunan Nasional, meliputi :

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi digital
7. Pembangunan rendah karbon
8. Reformasi perlindungan sosial
9. Reformasi pendidikan dan keterampilan
10. Reformasi kesehatan.

Dalam merumuskan Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 juga berpedoman terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dengan Tema ***“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19, Menuju Sumatera Utara Bermartabat”***. Berdasarkan tema tersebut telah ditetapkan 8 (Delapan) Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022 yaitu :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan
3. Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan
4. Penyedia layanan kesehatan yang berkualitas
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris
6. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata
7. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah serta untuk mendukung terwujudnya Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan Tema ***“Peningkatan Ekonomi, UMKM, Infrastruktur dan Pelayanan Dasar untuk mendukung Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan”*** maka Prioritas Pembangunan Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi sesuai RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi yaitu :

1. Peningkatan infrastruktur



2. Peningkatan ekonomi
3. Peningkatan pelayanan dasar
4. Peningkatan pertanian perkotaan

Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara dijabarkan pada tabel dibawah ini.



**Tabel 4.3**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Provsu**

NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2022)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (RKP 2022)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2022)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2022)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2022)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2022) PERMENDAGRI 90/2019
1.	PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkeadilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)</li> <li>2. Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan</li> <li>4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan</li> <li>5. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi</li> <li>6. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi</li> <li>7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)</li> <li>8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing.</li> </ol>	PP 1 : Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Penanganan Dampak <i>Covid-19</i></li> <li>2. BLK Center</li> <li>3. Sistem Pasar Kerja On line</li> </ol>	<b>Ekonomi</b> <b>(PN 1, PN 5)</b> <b>(PP 1, PP 6)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li> <li>2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li> <li>3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>4. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>5. Perizinan dan Pndapatan Prusahaan</li> <li>6. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</li> <li>7. Penigkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>8. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> </ol>



NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2022)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (RKP 2022)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2022)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2022)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2022)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2022) PERMENDAGRI 90/2019
2.	PN 2 :Mengembangkan Wilayah Untuk Pulau Kalimantan Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera;</li> <li>2. Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali,</li> <li>3. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;</li> <li>4. Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan;</li> <li>5. Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi;</li> <li>6. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku;</li> <li>7. Pembangunan Wilayah Pulau Papua</li> </ol>	PP 2 : Peningkatan dan Pemenuhan akses Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Bea Siswa Pendidikan “AKU ANAK SUMUT”</li> <li>2. Pembangunan dan Penataan Sekolah Bersih dan Indah</li> <li>3. Peningkatan Minat Baca</li> </ol>	<p><b>Pelayanan Dasar</b></p> <p>(PN 3, PN 4, PN 5)</p> <p>(PP 2, PP 4, PP 7)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Pendidikan.</li> <li>2. Pengembangan Kebudayaan.</li> <li>3. Pengembangan Kesenian Tradisional.</li> <li>4. Pembinaan Sejarah.</li> <li>5. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.</li> <li>6. Pengelolaan Permuseuman.</li> <li>7. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>8. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan minuman</li> <li>9. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan</li> <li>10. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> </ol>
3.	PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Kelola Kependudukan;</li> <li>2. Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial;</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</li> <li>4. Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas</li> <li>5. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda</li> <li>6. Mengentaskan Kemiskinan</li> <li>7. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing</li> </ol>	PP 3 : Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan LRT (Light Rapid Trasport)</li> <li>2. Konektivitas Kawasan Wisata</li> <li>3. Konektivitas Pesisir Pantai Timur</li> <li>4. Renovasi Mesjid Agung Medan</li> <li>5. Pembangunan TPA Regional</li> <li>6. Bedah Rumah “Peduli Masyarakat Miskin”</li> </ol>	<p><b>Infrastruktur</b></p> <p>(PN 2, PN 5)</p> <p>(PP 3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Jalan.</li> <li>2. Pengelolaan Sumbr Daya Air ( SDA )</li> <li>3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>4. Penataan Bangunan Gedung</li> <li>5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.</li> <li>6. Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li> <li>7. Penataan Bangunan dan Lingkungan</li> <li>8. Pengelolaan dan Pengembangan Siatem Air Limbah.</li> </ol>



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2022)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (RKP 2022)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2022)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2022)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2022)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2022) PERMENDAGRI 90/2019
4.	PN 4 : Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;</li> <li>2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan</li> <li>3. Memperkuat Moderasi Beragama</li> <li>4. Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas</li> </ol>	PP 4 : Penyediaan Layanan Kesehatan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Rumah Sakit Umum Deli Internasional</li> <li>2. Peningkatan Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Haji Medan</li> <li>3. Gubernur Sayang Lansia Bantuan Layanan Kesehatan Lansia</li> <li>4. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Jakes-Mamin)</li> </ol>		
5.	PN 5 : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;</li> <li>2. Infrastruktur Ekonomi</li> <li>3. Infrastruktur untuk Mendukung Perkotaan</li> <li>4. Energi dan Ketenagalistrikan</li> <li>5. Transformasi Digital</li> </ol>	PP 5 : Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Pertanian Terpadu Sistem Pertanian Terintegrasi (Sitantri)</li> <li>2. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Penangan Dampak Covid-19</li> </ol>		
6	PN 6 :Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;</li> <li>2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim</li> <li>3. Pembangunan Rendah Karbon</li> </ol>	PP 6 :Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Kawasan Wisata Religi</li> <li>2. Penataan Kawasan Taman Wisata Hutan (Ekowisata)</li> <li>3. Pembangunan Desa-Desa Wisata</li> </ol>	Pertanian Perkotaan ( PN 6) (PP 3, PP 5 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Pengendalian Pencemaran dan/ Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Pngelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> <li>4. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Limbah B3)</li> <li>5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin</li> </ol>



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(P-RKPD) TAHUN 2022**

NO.	PRIORITAS NASIONAL (RKP 2022)	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (RKP 2022)	PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2022)	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA (RKPD 2022)	PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2022)	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI (RKPD 2022) PERMENDAGRI 90/2019
						Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Pengelolaan Persampahan 9. Pengelolaan Perikanan Budidaya 10. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 11. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 12. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 13. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 14. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 15. Penyuluhan Pertanian 16. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 17. Pengawasan Keamanan Pangan 18. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 19. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 20. Penangan Kerawan Pangan
7	PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Konsolidasi Demokrasi; 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 3. Penegakan Hukum Nasional 4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.	PP 7 :Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Sistem Pelayanan Publik 2. Penyiapan Regulasi Ivestasi 3. Sistem Tata Kelola Pemerintahan 4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara		

Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Sasaran Pembangunan Kota Tebing Tinggi yang terdapat dalam RPJMD dijabarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tebing Tinggi**

Prioritas		Sasaran	
1	Peningkatan Infrastruktur	1	Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
		2	Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga.
		3	Tertatanya kawasan kota secara terpadu berdasar RTRW.
		4	Terciptanya kawasan ruang terbuka hijau dan pertamanan baru.
		5	Tertatnya sarana pendukung kota (parkir, rest area, pusat kuliner dan oleh-oleh).
		6	Meningkatnya kapasitas pelayanan sambungan air bersih.
		7	Terpenuhinya kebutuhan jaringan drainase.
		8	Tertatnya fasilitas sarana dan prasana perhubungan dan transportasi Kota.
		9	Meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum.
		10	Adanya Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandarisasi
		11	Adanya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan
		12	Perilaku masyarakat berwawasan lingkungan
2	Peningkatan Ekonomi	1	Infrastruktur, sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan.
		2	Tersedianya sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
		3	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah.
		4	Meningkatnya kapasitas investasi daerah dalam menyerap tenaga kerja lokal.
		5	Meningkatnya partisipasi pengusaha lokal dalam peluang investasi daerah.
		6	Kebijakan yang mendukung pengembangan usaha pariwisata.



Prioritas		Sasaran	
		7	Adanya sistem informasi pariwisata.
		8	Terbentuknya sentra-sentra industri rakyat pendukung pariwisata.
		9	Terbentuknya sentra-sentra industri rakyat pendukung pariwisata.
		10	Terbangunnya landmark wisata di Kota Tebing Tinggi.
		11	Terbangunnya jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dan kelembagaan kepariwisataan.
		12	Terselenggaranya kuantitas dan kualitas atraksi wisata/daya tarik.
3	Peningkatan Pelayanan Dasar	1	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
		2	Peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional.
		3	Peran nyata pemerintah di seluruh aspek kehidupan.
		4	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum
		5	Sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.
		6	Kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
		7	Pelayanan publik berbasis <i>E-Government</i> .
		8	Sistem pelayanan kependudukan terpadu dan berbasis informasi teknologi.
		9	Sistem aplikasi Pelayanan dan Perijinan On-Line
		10	Penyediaan fasilitas jaringan internet.
		11	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
		12	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.
		13	Adanya upaya promotif dan pereventif gerakan masyarakat hidup sehat.
		14	Adanya upaya perbaikan gizi masyarakat.
		15	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
		16	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.



Prioritas		Sasaran	
		17	Adanya upaya perbaikan gizi masyarakat di setiap kecamatan.
		18	Optimalisasi pelayanan kesehatan.
		19	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang nyaman dan terjaga.
		20	Pemanfaatan potensi lokal yang strategis sebagai titik sentra segi tiga emas.
		21	Pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan
		22	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang
		23	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
4	Peningkatan Pertanian Perkotaan	1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
		2	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan komoditi pertanian dan olahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi
		3	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan florikultura
		4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas ternak
		5	Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan



## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi pada menjadi pedoman Perubahan APBD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi. Rancangan program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 berisi tentang Perubahan Pendapatan, Perubahan Belanja, Perubahan Pembiayaan, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) Tahun 2022 serta program dan kegiatan yang tetap Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS Tahun 2022. Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 memuat diantaranya: 1) Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2022 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas, dan 3) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJPD Tahun 2006-2025 Kota Tebing Tinggi serta mengacu kepada program prioritas pembangunan yang terdapat pada RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Untuk lebih jelasnya program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 5.1

Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi  
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kejt	Jlh Sub Kejt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	6	17	95	188.923.312.677,00	181.839.097.144,00	(7.084.215.533,00)	
2	Bidang Kesehatan	5	19	65	173.458.349.648,00	189.330.884.526,00	15.872.534.878,00	
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	59	75.455.648.778,00	77.134.291.662,00	1.678.642.884,00	
4	Bidang Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	5	13	33	16.992.246.886,00	18.915.457.214,00	1.923.210.328,00	
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	· Satpol PP	2	8	23	7.578.602.915,00	6.776.942.246,00	(801.660.669,00)	



Tabel 5.1

Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi  
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kejt	Jlh Sub Kejt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	· BPBD	3	12	26	20.619.680.036,00	23.759.971.543,00	3.140.291.507,00	
	· Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	9	20	7.040.559.994,00	4.394.769.182,00	(2.645.790.812,00)	
6	Bidang Sosial	6	14	32	6.529.959.240,00	5.965.334.230,00	(564.625.010,00)	
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>	<b>111</b>	<b>353</b>	<b>496.598.360.174,00</b>	<b>508.116.747.747,00</b>	<b>11.518.387.573,00</b>	

Tabel 5.2

Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi  
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kejt	Jlh Sub Kejt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	Bidang Tenaga kerja	5	12	25	5.156.692.800,00	3.833.117.494,00	(1.323.575.306,00)	
2	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	14	40	5.573.816.539,00	5.901.678.750,00	327.862.211,00	
3	Bidang Lingkungan Hidup	9	16	34	20.049.339.168,00	18.899.630.645,00	(1.149.708.523,00)	
4	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	10	17	4.861.199.292,00	4.651.737.324,00	(209.461.968,00)	
5	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	10	24	55	4.903.711.546,00	4.700.538.606,00	(203.172.940,00)	
6	Bidang Perhubungan	2	9	23	6.357.458.200,00	6.747.731.800,00	390.273.600,00	
7	Bidang Komunikasi dan Informatika	5	11	20	8.590.558.493,00	9.275.510.871,00	684.952.378,00	
8	Bidang Penanaman Modal	6	12	26	5.880.962.248,00	4.591.995.200,00	(1.288.967.048,00)	
9	Bidang Pemuda dan Olahraga	6	12	22	8.790.203.646,00	7.806.373.759,00	(983.829.887,00)	
10	Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah	3	11	27	4.280.303.916,00	4.351.463.027,00	71.159.111,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>54</b>	<b>131</b>	<b>289</b>	<b>74.444.245.848,00</b>	<b>70.759.777.476,00</b>	<b>(3.684.468.372,00)</b>	

Tabel 5.3

Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi  
Urusan Pemerintahan Pilihan

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kejt	Jlh Sub Kejt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	Bidang Pertanian	11	21	37	14.210.999.412,00	11.417.876.443,00	(2.793.122.969,00)	
2	Perdagangan	11	19	31	7.955.434.932,00	8.383.707.494,00	428.272.562,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>22.166.434.344,00</b>	<b>19.801.583.937,00</b>	<b>(2.364.850.407,00)</b>	



Tabel 5.4  
Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi  
Unsur Pendukung Urusan Pmerintahan

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kejt	Jlh Sub Kejt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	Sekretariat Daerah	3	19	53	42.813.104.446,00	33.757.209.996,00	(9.055.894.450,00)	
2	Sekretariat DPRD	2	15	40	25.456.344.031,00	22.121.368.029,00	(3.334.976.002,00)	
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>34</b>	<b>93</b>	<b>68.269.448.477,00</b>	<b>55.878.578.025,00</b>	<b>(12.390.870.452,00)</b>	

Tabel 5.5  
Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi  
Unsur Penunjang Urusan Pmerintahan

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kejt	Jlh Sub Kejt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	Perencanaan	4	14	54	6.749.283.879,00	7.356.130.702,00	606.846.823,00	
2	Keuangan	4	13	61	50.231.766.438,00	24.558.458.384,00	(25.673.308.054,00)	
3	Kepegawaian	2	10	21	6.666.263.949,00	6.384.890.030,00	(281.373.919,00)	
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>	<b>37</b>	<b>136</b>	<b>63.647.314.266,00</b>	<b>38.299.479.116,00</b>	<b>(25.347.835.150,00)</b>	

Tabel 5.6  
Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi  
Unsur Pengawasan Urusan Pmerintahan

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kejt	Jlh Sub Kejt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	Inspektorat	3	12	34	7.824.854.856,00	8.437.477.300,00	612.622.444,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>7.824.854.856,00</b>	<b>8.437.477.300,00</b>	<b>612.622.444,00</b>	

Tabel 5.7  
Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi  
Unsur Kewilayahan

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kejt	Jlh Sub Kejt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	Kecamatan							
	· Kecamatan Bajenis	3	8	16	8.298.781.643,00	6.466.853.994,00	(1.831.927.649,00)	
	· Kecamatan Padang Hilir	3	10	19	7.841.666.639,00	6.984.847.000,00	(856.819.639,00)	
	· Kecamatan Padang Hulu	3	9	20	8.825.375.495,00	6.358.453.332,00	(2.466.922.163,00)	
	· Kecamatan Tebing Tinggi Kota	3	9	18	8.710.802.382,00	6.728.912.443,00	(1.981.889.939,00)	
	· Kecamatan Rambutan	3	9	19	8.211.384.775,00	6.845.803.400,00	(1.365.581.375,00)	
<b>JUMLAH</b>		<b>15</b>	<b>45</b>	<b>92</b>	<b>41.888.010.934,00</b>	<b>33.384.870.169,00</b>	<b>(8.503.140.765,00)</b>	

Tabel 5.8  
Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi  
Unsur Pemerintahan Umum

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kegt	Jlh Sub Kegt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
1	Kesbang linmas	6	11	30	6.336.422.780,00	5.460.422.053,00	(876.000.727,00)	
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>6.336.422.780,00</b>	<b>5.460.422.053,00</b>	<b>(876.000.727,00)</b>	

Tabel 5.9  
Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi

NO	BIDANG	Jlh Prog	Jlh Kegt	Jlh Sub Kegt	Plafon Anggaran (Rp)			Alasan Perubahan
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
	<b>TOTAL</b>	154	421	1095	781.175.091.679,00	740.138.935.823,00	(41.036.155.856,00)	

Bahwa Pagu Anggaran SKPD pada Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi telah memuat Kapasitas Rill kemampuan keuangan daerah, yang memuat Capaian Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis pada Perubahan RKPD, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 5.10  
Capaian Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis pada Perubahan RKPD

No	Prioritas Kota Tebing Tinggi	Program Prioritas	SKPD
1	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</li> <li>2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</li> <li>3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li> <li>4. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>5. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>6. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>7. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>8. Peningkatan Kesempatan Kerja</li> <li>9. Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.</li> <li>10. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga</li> </ol>	Perdagangan, Penanaman Modal, Pemuda dan Olah Raga, Ketahanan Pangan & Pertanian, Ketenagakerjaan



No	Prioritas Kota Tebing Tinggi	Program Prioritas	SKPD
		Ketenagakerjaan 11. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. 12. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. 13. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 14. Kerawanan Pangan. 15. Pengawasan Keamanan Pangan. 16. Pengelolaan Perikanan Budidaya. 17. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 18. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 19. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 20. Pengembangan Iklim Penanaman Modal. 21. Promosi Penanaman Modal. 22. Pelayanan Penanaman Modal. 23. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal. 24. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 25. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 26. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan. 27. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. 28. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 29. Pemasaran Pariwisata	
2	Pelayanan Dasar	1. Pengelolaan Pendidikan. 2. Pengembangan Kurikulum. 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 4. Pengembangan Kebudayaan.	Pendidikan, Kesehatan



No	Prioritas Kota Tebing Tinggi	Program Prioritas	SKPD
		5. Pengembangan Kesenian Tradisional. 6. Pembinaan Sejarah. 7. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. 8. Pengelolaan Permuseuman. 9. Pengembangan Bahasa dan Sastra. 10. Pengendalian Perizinan Pendidikan. 11. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 12. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan 13. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
3	Infrastruktur	1. Penyelenggaraan Jalan. 2. Penataan Bangunan Gedung 3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. 4. Penyelenggaraan Penataan Ruang. 5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 6. Pengembangan Perumahan. 7. Pengelolaan Persampahan 8. Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh. 9. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehayati) 10. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).	PUPR, Perumahan Kawasan Permukiman & Kebersihan, Perhubungan
4	Pertanian Perkotaan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Penyuluhan Pertanian 4. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 5. Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No	Prioritas Kota Tebing Tinggi	Program Prioritas	SKPD
		6. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 7. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8. Penangan Kerawan Pangan	

Untuk Penyelarasan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Program Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 5.11**  
**Penyelarasan Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Provinsi Sumatera Utara dengan Program Kegiatan Prioritas Kota Tebing Tinggi**

No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kota Tebing Tinggi	Program/Kegiatan
1	Kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan	Ekonomi	1. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 5. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 6. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 7. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 8. Peningkatan Kesempatan Kerja 9. Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 10. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 11. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. 12. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. 13. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.



No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kota Tebing Tinggi	Program/Kegiatan
			<ol style="list-style-type: none"><li>14. Kerawanan Pangan.</li><li>15. Pengawasan Keamanan Pangan.</li><li>16. Pengelolaan Perikanan Budidaya.</li><li>17. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.</li><li>18. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.</li><li>19. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.</li><li>20. Pengembangan Iklim Penanaman Modal.</li><li>21. Promosi Penanaman Modal.</li><li>22. Pelayanan Penanaman Modal.</li><li>23. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.</li><li>24. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.</li><li>25. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.</li><li>26. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.</li><li>27. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.</li><li>28. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.</li><li>29. Pemasaran Pariwisata</li></ol>
2	Pendidikan	Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Pendidikan.</li><li>2. Pengembangan Kurikulum.</li><li>3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li><li>4. Pengembangan Kebudayaan.</li><li>5. Pengembangan Kesenian Tradisional.</li><li>6. Pembinaan Sejarah.</li><li>7. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.</li><li>8. Pengelolaan</li></ol>



No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kota Tebing Tinggi	Program/Kegiatan
			Permuseuman. 9. Pengembangan Bahasa dan Sastra. 10. Pengendalian Perizinan Pendidikan.
3	Infrastruktur berwawasan lingkungan	Infrastruktur	1. Penyelenggaraan Jalan. 2. Penataan Bangunan Gedung 3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. 4. Penyelenggaraan Penataan Ruang. 5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. 6. Pengembangan Perumahan. 7. Pengelolaan Persampahan 8. Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh. 9. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehayati) 10. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
4	Kesehatan	Pelayanan Dasar	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan 3. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5	Daya saing sektor agraris	Pertanian Perkotaan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Penyuluhan Pertanian 4. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 5. Pengawasan Keamanan Pangan 6. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk



No	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Kota Tebing Tinggi	Program/Kegiatan
			Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 7. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8. Penangan Kerawan Pangan
6	Daya saing pariwisata		
7	Pelayanan sosial pemasyarakatan dan olahraga		
8	Reformasi birokrasi		

Terkait dengan data program yang mendukung pencapaian indikator makro, pencapaian IKU, pencapaian IKK, program yang mendukung focus pembangunan dan prioritas pembangunan, telah kami tambahkan sebagaimana termaksud dalam laporan evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi.



## BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun untuk percepatan pencapaian target kinerja pembangunan yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi. Upaya percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022. Perubahan RKPD Tahun 2022 memiliki peran yang penting yaitu menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah.

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah melalui program-program pembangunan daerah. Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2022 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Tahun 2022 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 semester I (sampai dengan Triwulan II), menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan. Perubahan RKPD Tahun 2022 memuat penyesuaian-penyempaan tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Perubahan RKPD Tahun 2022 Kota Tebing Tinggi sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah serta sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUAPBD) Tahun 2022 serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan PPAS-APBD) Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.